



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI IV DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Direktur Utama PT. Garam Indonesia, dan Direktur PT. Perikanan Indonesia.
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022
Waktu : pukul 10.30 s.d. 13.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S. E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)
Acara : Membahas:
1. Ketersediaan Stok Ikan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional;
2. Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI;
3. Program Prioritas tahun 2023; dan
4. Isu-isu aktual lainnya
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3 dari 11 orang Anggota
1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV
2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
3) Ir. Mindo Sianipar
2. Fraksi Partai Golongan Karya
2 dari 8 orang Anggota
1) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
2) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
3 dari 7 orang Anggota
1) Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
2) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
3) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari,

DESS., M.Sc.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
4 dari 6 orang Anggota
 - 1) Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV)
 - 2) H. Sulaeman L. Hamzah
 - 3) Ir. Abdullah Tuasikal
 - 4) Yessy Melania, S.E.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3 dari 6 orang Anggota
 - 1) H. Muhtarom, S.Sos.
 - 2) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
 - 3) Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat
2 dari 5 orang Anggota
 - 1) DR. Suhardi Duka, M.M.
 - 2) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3 dari 5 orang Anggota
 - 1) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
 - 2) Prof. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 - 3) Saadiyah Uluputty, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 3 orang Anggota
 - 1) H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 - 2) Haerudin, S.Ag., M.H.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 dari 2 orang Anggota

-

- B. Pemerintah
1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
 2. Direktur Utama PT. Garam Indonesia;
 3. Direktur Utama PT. Perikanan Indonesia.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Berhubung *nggak* ada Pimpinan yang lain ya.

Yang terhormat Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Garam (Persero),
Yang terhormat Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, serta
Hadirin yang kami hormati.

Untuk mengesahkan jalannya rapat, saya minta satu Anggota dampingi saya di sebelah kiri atau sebelah kanan, asal jangan di depan. Silakan.

Udah Pak Hanan jangan banyak omong, sini, besok Bapak.. Bapak gantiin Dedi di sini. Udah udah.

Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan acara rapat Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Bamus tanggal 14 Februari 2022 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 16 Maret, hari ini Rabu, tanggal 23, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas:

1. Ketersediaan stok ikan menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan nasional;
2. Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV;
3. Program prioritas tahun 2023; dan
4. Isu-isu aktualnya.

Menteri dan Pak Sekjen ya setiap kami kunjungan kerja pulang masing-masing staf sesuai bidangnya melaporkan apa yang menjadi kendala di lapangan. Karena saya bilang, kalau kita ke lapangan ada kendala kemudian tidak dilaporkan ya percuma kita kunjungan kerja. Ini yang namanya menyerap aspirasi masyarakat diserap dan harus diselesaikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Rapat Kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)**

Rapat Kerja hari ini kami mulai pukul 10.30 WIB, mohon maaf saya ada keterlambatan dan akan diakhiri pada pukul 13.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan pengendalian penyebaran Covid-19, antara lain dengan himbauan menerapkan protokol kesehatan 5M, juga vaksinasi kepada masyarakat. Adapun dalam rangka respon transisi menuju kehidupan yang normal, kita harapkan KKP menyiapkan berbagai langkah adaptif dalam bentuk merencanakan agenda besar melalui program dan kegiatan prioritas dan reguler di tahun 2023 secara efisien, berkualitas, terukur, tepat sasaran, akuntabel, dan transparan.

Mengingat tidak dipungkiri dengan keterbatasan anggaran, saya tegaskan kembali, dengan keterbatasan anggaran, pembangunan integrasi di sentra-sentra Kelautan dan Perikanan yang keberlanjutan serta penguatan kelembagaan usaha dan peningkatan SDM untuk menjadi prioritas utama dalam menyongsong perbaikan sistem tata kelola usaha Kelautan dan Perikanan di masa yang akan datang. Selain itu, Komisi IV memandang program dan kegiatan yang telah berjalan dengan baik selama ini perlu diadopsi dan diulang kembali untuk tahun 2023. KKP perlu menambah inovasi baru dan program dan kegiatan yang mempunyai daya manfaat lebih besar untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga transformasi perekonomian sektor Kelautan Perikanan dapat tumbuh dengan cepat dan dapat menjadi salah satu andalan devisa negara. Hal ini tentunya sinergitas Rencana Kerja Pemerintah sebagai penjabaran dalam dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah panjang (RPJM) Tahun 2020-2024.

Untuk itu, Komisi IV meminta penjelasan usulan pagu indikatif rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp15 triliun dalam rangka menuju perbaikan penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan tahun 2023.

Selanjutnya dalam rangka *monitoring* ketersediaan stok ikan menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan nasional, Komisi IV ingin memastikan KKP mampu berkoordinasi dengan PT Perikanan Indonesia untuk menangani peningkatan kebutuhan pasokan ikan di setiap daerah dengan harga yang terjangkau, mengingat ikan merupakan sumber daya pangan utama rakyat Indonesia yang bergizi sangat tinggi. Selain itu, Komisi IV juga ingin mengetahui penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap tindak lanjut kunjungan kerja reses yang telah dilaksanakan Masa Persidangan yang lalu. Adapun isu-isu yang mencuat sebagai berikut:

1. Adanya permintaan pupuk bersubsidi oleh pembudidaya ikan tradisional yang tidak ada di pasaran tahun 2022 merupakan masa transisi yang semula kewenangannya ada di Kementerian Pertanian menjadi kewenangan Kementerian KKP.

Jadi sekian tahun ini *blunder*, petambak kok yang ambil haknya pertanian, saya lapor BPK ternyata di BPK ada temuan bahwa itu bukan tupoksinya Kementerian Pertanian. Maka, saya langsung panggil Dirjen Budidaya segera tindaklanjuti, kalau perlu ambil data mereka verifikasi ulang agar semester kedua di bulan Juli petambak ikan mendapatkan haknya kembali pupuk bersubsidi ya tapi setelah ambil jangan di jangan ditindaklanjuti, tetap diverifikasi ulang karena nilainya cuma sekali itu Rp425 miliar.

2. Adanya penolakan kedatangan nelayan jaring tarik berkantong dari Pantura ke WPP-711 dan masih ditemukannya penolakan masyarakat terhadap konsep penangkapan ikan terukur dan tarif PNPB.
3. Adanya impor ikan segar dan ikan hias dari negara asal yang ditemukan memiliki penyakit *Viral Hemorrhagic Septicemia* (VHS) dan dokumen tidak memenuhi persyaratan karantina.

Saran saya segera dicarilah Kepala BKIPM yang baru yang tegas yang berani, jangan yang penakut.

4. Adanya pengeboman ikan masih marak di wilayah kabupaten Lembata.
5. Adanya permintaan peran KKP di forum G20 terhadap isu kesehatan laut dan Perikanan berkelanjutan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Demikian pengantar kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan agenda Rapat Kerja hari ini. Saya persilakan.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya,

Om swastiastu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mohon maaf Pak Menteri, saya ada kelupaan ya. Ini ada Anggota Komisi IV yang baru, supaya nanti jangan salah paket bantuannya jangan salah, karena yang sudah lewat biarkan lewat, yang lalu yang mendapatkan hak. Saya perkenalkan yang semula Pak Muslim dari Fraksi Demokrat digantikan Muhammad Dhevy Bijak Pawindu. Tolong memperkenalkan Dapil

dan wilayahnya kabupatennya supaya nanti bantuannya jangan salah sasaran ke yang lain. Silakan.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Terima kasih banyak Ketua. Izin Pak Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Izin saya Muhammad Dhevy Bijak Pawindu dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Sulawesi Selatan III ada 9 Kabupaten Pak, salah satunya ada Luwu dan Palopo, dan beberapa Kabupaten lagi. Selanjutnya saya dari Komisi VI sebelumnya dan diamanahkan untuk kembali di Komisi IV.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi maksudnya saya 9 Kabupaten, jadi kasihnya banyakan gitu maksudnya.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Terima kasih Pimpinan.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Puji syukur.

Yang terhormat Ketua, Pimpinan, dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah *Subhanahu Wata'ala* atas karunia yang dicurahkan, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan Rapat Kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI dengan agenda seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu:

- Ketersediaan stok ikan menjelang Ramadhan dan hari besar keagamaan nasional;
- Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI;
- Program prioritas tahun 2023; dan
- Isu-isu aktual lainnya.

Sebelum saya menyampaikan bahan presentasi, izinkan saya memperkenalkan para pejabat yang baru dilantik pada tanggal 4 Maret 2022, yaitu:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H.

2. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Nyoman Radiarta, S.Pi, M.Sc.
3. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Saudara Ir. I Nengah Putra Winata, M.B.A.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Menteri, ini kalau *nggak* salah nanti yang membantu masalah KUR ya?

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Siap.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya saya minta tolong nanti dibantu cari waktu yang tepat waktu RDP sosialisasikan kepada seluruh Anggota, supaya Anggota pulang ke Dapil bisa juga mensosialisasikan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan KUR-nya termasuk juklak juknisnya ya.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Siap. Baik, terima kasih.

Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Terkait agenda pertama, izinkan kami menyampaikan bahwa berdasarkan prognosa tahun 2022, kebutuhan ikan selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri diperkirakan sebesar 2,64 juta ton, sementara itu prognosa ketersediaan ikan selama bulan April dan Mei diperkirakan sebesar 2,99 juta ton. Dengan memperhatikan pola musim penangkapan dan produksi budidaya, dengan demikian prognosa pasokan ikan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Berikut adalah gambaran kondisi pasokan dan ketersediaan ikan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dalam kurun waktu 3 tahun, di mana pasokan ikan selalu dalam kondisi cukup.

Untuk harga rata-rata komoditas ikan penting di beberapa kota besar, hasil survei menunjukkan bahwa harga ikan diperkirakan meningkat 5-10% pada minggu pertama puasa. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan permintaan ikan dan kebiasaan nelayan yang tidak melaut untuk menyambut awal bulan Ramadhan. Kemudian harga ikan akan stabil pada minggu kedua hingga lebaran. Permintaan menurun pada saat Lebaran, lalu stabil di H+3 Lebaran. Kemudian H+7 meningkat yang disebabkan peningkatan jumlah permintaan untuk keperluan mereka dan oleh-oleh. Apabila dibandingkan dengan produk substitusi protein selain ikan seperti telur dan daging ayam, harga komoditas perikanan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri masih kompetitif dan memiliki ragam pilihan, selain ikan memiliki kadar protein yang tinggi dan omega 3.

Untuk menjaga pasokan dan harga rata-rata komoditas ikan penting di masyarakat khususnya pada H+1 sampai dengan H+7 bulan Ramadhan dan saat Lebaran sampai dengan H+7 setelah lebaran, maka pasokan ikan akan *supply* dari stok yang ada di Gudang Beku dan produksi perikanan budidaya. Beberapa daerah komoditas perikanan tertentu sangat diminati pada saat Lebaran sebagai hidangan khas seperti di Sumatera Selatan itu Tenggiri, kemudian Banten Wilayah utara Bandeng, Jawa Tengah wilayah Utara Bandeng, Sumatera Utara Kembung, Sulawesi Selatan Bandeng. Ikan olahan terutama *value added* produk dari kaleng pada saat puasa dan Lebaran meningkat cukup tinggi karena sifatnya yang mudah disimpan dan diolah, serta kebutuhan untuk parcel bingkisan saat Lebaran.

Pimpinan yang saya hormati dan Anggota Komisi IV.

Selanjutnya terkait tindak lanjut kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kunjungan kerja ke budidaya Koral, Kerapu, Lobster di Serang dan Denpasar itu pada Februari 2021.
 - Pada tahun 2021 telah didistribusikan bantuan benih ikan laut dan Keramba Jaring Apung di daerah Denpasar Selatan.
 - Pendampingan teknologi dan penyediaan sarpras dilakukan oleh UPT BPBAP Situbondo dan BPIUK Karangasem. Selain itu BRSDM pun telah melaksanakan inovasi riset polikultur Abalon dan Kerapu Hibrida Cantang.
2. Kunjungan kerja ke Konservasi dan Budidaya Ikan di Danau Singkarak pada bulan April 2021.
 - Pada tahun 2021 KKP memberikan bantuan benih ikan air tawar, calon induk, pakan, bioflok, dan *restocking* ikan endemik, dan bantuan permodalan dari BLU LPMUKP.
 - Pada tahun 2022 KKP berencana melanjutkan kegiatan bantuan Pemerintah bidang Perikanan Budidaya untuk mendukung alih usaha nelayan.
 - Pengembangan dan pendampingan teknologi pembenihan dan pembesaran ikan bilih dilakukan oleh BPBAP Sungai Gelam. KKP pada tahun 2023 akan menyusun rencana pengelolaan perikanan ikan bilih.
3. Kunjungan kerja ke Pokdakan Ikan Mas Majalaya di Kabupaten Bandung pada bulan Oktober 2021.
 - Pada 2021 KKP memberikan bantuan benih ikan calon induk, bioflok, dan bantuan sarpras di Kabupaten Bandung, serta pelatihan budidaya.
 - Pada tahun 2022 KKP berencana melanjutkan bantuan Pemerintah seperti benih ikan air tawar, calon induk kepada Unit Pembenihan Rakyat, pakan mandiri, bioflok, asuransi, dan *restocking* ikan endemik.
 - KKP terus mendorong keberlanjutan ikan endemik salah satunya ikan Mas Majalaya dengan mendorong pembudidaya bersertifikat CBIB, CPIB, dan CPPIB, dan bimbingan teknis oleh BBPBAT Sukabumi.

4. Tindak lanjut hasil kunjungan kerja ke Danau Toba juga pada Oktober 2021.
 - Pada tahun 2021 KKP me-*restocking* ikan tawes, ikan nilam, dan ikan bilih di Danau Toba, serta menghimbau agar masyarakat tidak *restocking* ikan nila karena bersifat invasif dan menghilangkan habitat asli.
 - Dalam Rakor Danau Toba, Kemenkomarinvest KKP mendukung kebijakan penertiban jumlah KJA dan menjaga KJA yang dapat beroperasi tidak melampaui batas.
 - Pada tahun 2022 KKP akan melanjutkan kegiatan *restocking* ikan endemik Danau Toba serta alih profesi ke Darat bagi peserta KJA yang terkena dampak melalui bantuan bioflok.
5. Kunjungan kerja ke Republik Lele di Kediri pada bulan Desember 2021.
 - Kabupaten Kediri telah ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya dengan sentra produksi di Republik Lele melalui Kepmen KP No 16/2022.
 - Pada tahun 2022 KKP merencanakan penyediaan sarana produk, pakan, kesehatan ikan, dan papan informasi di Kampung Lele Kediri.
 - Di Kabupaten Kediri KKP merencanakan bantuan benih calon induk, bioflok, dan mesin pakan, serta mempermudah sertifikasi CPPIB.
6. Kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja-Lampulo dan *Integrated Cold Storage* pada bulan Februari 2022.
 - Mengacu Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Lampulo secara administrasi merupakan UPT Daerah milik Provinsi Aceh.
 - KKP telah menyarankan kepada Pemda Aceh untuk dapat terlebih dahulu menyiapkan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya termasuk izin lingkungan, sehingga kebutuhan kegiatan fisik pengerukan dapat terlaksana secara tepat sasaran.
 - Berikutnya *Integrated Cold Storage* saat ini telah operasional dan dikelola oleh dinas kelautan perikanan Provinsi.
7. Kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikerto pada bulan April 2021.
 - Rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Kemenko Marves pada Rabu 4 Maret 2021, Kemenko Marves dan Pemerintah Provinsi DIY sudah sepakat untuk mengintegrasikan perencanaan Pantai Selatan dengan penataan kawasan di sekitar yakni PT Tanjung Adikarto, kawasan strategis YIA, dan kawasan Pantai Selatan DIY.
 - Kendala utama penyelesaian atau pengoperasionalan PP Tanjung Adikarto yaitu pendangkalan kolam dan alur kapal, serta tumpang tindih status kepemilikan infrastruktur di antaranya dimiliki oleh kementerian PUPR atau BBWS Serayu Opak untuk *breakwater* DKP DI Yogyakarta dan DKP Kabupaten Kulonprogo.
 - Untuk menyelesaikan permasalahan pendangkalan dan rehab sarana dan prasarana pelabuhan, estimasi biaya mencapai Rp183 miliar.

- Rencana pengembangan lebih lanjut akan dikoordinasikan Kemenko Marves melalui tim TP5D DIY.
8. Kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada bulan April 2021.
 - PPS Bitung direncanakan akan dikembangkan sebagai percontohan pelabuhan perikanan berstandar internasional dan berwawasan lingkungan (Eco Port).
 9. Kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Untia Makassar pada Oktober 2021.
 - Saat ini KKP bersama KemenPAN RB sedang intensif membahas langkah-langkah penataan organisasi termasuk pengusulan PP Untia menjadi UPT Ditjen Perikanan Tangkap.
 10. Kunjungan kerja ke Stasiun PSDKP Kalimantan Timur pada bulan Desember 2021.
 - Ditjen PSDKP telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meminta hibah lahan yang akan digunakan bagi pengembangan kelembagaan pengawasan SDKP.
 11. Kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan pada bulan Februari 2022.
 - PPS Belawan direncanakan akan dikembangkan sebagai percontohan Pelabuhan Perikanan berstandar internasional dan berwawasan lingkungan.
 12. Kunjungan kerja ke Politeknik KP Sidoarjo dan Balai Karantina Perikanan pada bulan Februari 2022.
 - Dengan telah ditetapkannya Politeknik KP Sidoarjo sebagai satker Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri Keuangan, maka hasil karya Politeknik KP Sidoarjo akan dioptimalkan produksi dan pemasarannya melalui mekanisme BLU.
 - Data eksisting peserta didik Politeknik KP Sidoarjo saat sebanyak saat ini sebanyak 470 orang di mana 410 orang atau 87% berada di Provinsi Jawa Timur.
 14. Kunjungan kerja Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru pada bulan Maret 2022.
 - BKIPM akan meningkatkan semua status kelembagaan atau eselon satker UPT BKIPM yang berada pada wilayah Provinsi dan akan dibahas dengan Kementerian PAN dan RB.

Pimpinan dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,

Agenda ketiga terkait program prioritas KKP tahun 2023, sampai dengan saat ini usulan dukungan KKP dalam prioritas nasional tahun 2023 dengan tema RKP peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Usulan total pagu indikatif KKP tahun 2023 sebesar Rp15 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp590 miliar;
- Inspektorat Jenderal sebesar 87 miliar;
- Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3,57 triliun;
- Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp4,2 triliun;
- Ditjen PSDKP sebesar Rp1,67 triliun;
- Ditjen PDSPKP sebesar Rp754 miliar;

- Ditjen PRL sebesar Rp730 miliar;
- BRSDMKP sebesar Rp2,53 triliun;
- BKIPM sebesar Rp855 miliar.

Adapun usulan rancangan kegiatan prioritas KKP tahun 2023, antara lain:

1. Perikanan Tangkap
 - Implementasi Penangkapan Ikan Terukur di 11 WPP berbasis kuota dengan sinergi kegiatan pengalokasian kuota, sistem pendataan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - Pembangunan Kampung Nelayan Maju dengan kegiatan pemberdayaan nelayan seperti bantuan sarana penangkapan, bakti nelayan, asuransi, dan pengembangan korporasi nelayan.
2. Perikanan Budidaya
 - Pengembangan Budidaya berorientasi ekspor, yakni untuk udang melalui tambak udang berbasis kawasan, bantuan sarana produksi, *Hatchery*, dan asuransi budidaya;
 - Pengembangan budidaya lobster dan kepiting terintegrasi;
 - Pengembangan budidaya rumput laut melalui kultur jaringan dan bantuan kebun bibit; dan
 - Pembangunan Kampung Perikanan Budidaya.
3. Penguatan Daya Saing
 - Peningkatan konsumsi ikan melalui kampanye Gemarikan;
 - Pembangunan sentra kuliner dan pasar ikan;
 - Pengembangan sistem rantai dingin melalui bantuan *Coolbox*, *Chest Freezer*, Pabrik Es, Gudang Beku, dan mobil berpendingin;
 - Pengembangan usaha dan investasi melalui sertifikasi GMP bagi UPI, penumbuhan wirausaha, fasilitasi kemitraan dan akses pembiayaan; dan
 - Promosi produk Kelautan dan Perikanan berskala internasional.
4. Pengelolaan Ruang Laut
 - Pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
 - Rehabilitasi kawasan pesisir, antara lain: melalui rehabilitasi mangrove, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan bulan cinta laut.
 - Pengembangan usaha garam rakyat; dan
 - Pengelolaan perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
5. Pengawasan Sumber daya KP
 - Pengawasan penangkapan ikan terukur berbasis data satelit, antara lain: melalui operasional kapal pengawas, pesawat patroli, speed boat, pembangunan kapal pengawas, pembinaan POKMASWAS.
 - Pengawasan usaha budidaya; dan
 - Pengawasan kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia KP
 - Pelatihan masyarakat KP;
 - Penyuluhan kelompok pelaku usaha KP;
 - Pendidikan vokasi; dan
 - Inkubasi bisnis usaha Kelautan dan Perikanan.
7. Karantina ikan dan pengendalian mutu

- Penerapan sistem jaminan mutu antara lain melalui sertifikasi, peremajaan sarpras, pengujian mutu;
 - Pengembangan karantina ikan; dan
 - Pengembangan laboratorium rujukan dan akreditasi.
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan
- Pelatihan Masyarakat Kelautan Perikanan;
 - Penyuluhan kelompok pelaku usaha KP;
 - Pendidikan vokasi; dan
 - Inkubasi bisnis rintisan usaha Kelautan Perikanan.
7. Karantina ikan dan penerapan sistem jaminan mutu
- Penerapan sistem jaminan mutu antara lain melalui sertifikasi, peremajaan sarpras, pengujian mutu;
 - Pengembangan karantina ikan; dan
 - Pengembangan laboratorium rujukan dan akreditasi.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada Rapat Kerja kali ini. Kami mohon dukungan dan persetujuan Komisi IV DPR RI. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan jadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2022 dan rencana program dan kegiatan tahun 2023.

Terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi teman-teman Anggota Komisi IV tadi cita-citanya Pak Menteri banyak sekali karena pengajuannya banyak. Kalau saya jadi Menteri, saya *nggak* mengajukan 15, saya minta Rp30 miliar sekalian, dapat.. 30 triliun triliun, 50%-nya kan Rp15 triliun, kalau ngajuin 15 cuma dikasih 50% dapat 7,5 belum nanti *refocusing* lagi. Makanya saya bilang jangan tanggung-tanggung 25 T atau 30 T sekalian tapi dengan ketentuan yang di sana itu di lobi dulu Bappenas, Kementerian Keuangan, termasuk juga bicara dengan Presiden. Ya kalau Komisi IV ini tergantung Anggota Banggarnya berani gebrak meja *nggak* waktu Rapat Banggar, kan itu aja.

Terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan Anggota Komisi IV yang pertama Ibu Endang. Kalau bisa jangan lebih dari 3 menit, singkat, jelas, *to the point*, jangan *ngalor ngidul* ngomongnya. Silakan.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M. Sc):

Terima kasih.

Pak Ketua yang saya banggakan beserta Anggota Dewan yang kami banggakan juga, khususnya kepada Pak Menteri dan jajarannya, termasuk Pimpinan PT Perikanan Indonesia (Persero),

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sehat buat kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa hadir dalam rapat yang sangat berharga ini.

Pak Menteri tadi sudah mengemukakan ada beberapa prioritas, nah dalam hal ini Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa ketersediaan ikan menjelang Idul Fitri selama periode 4 tahun terakhir yang rata-rata menurut Pak Menteri meningkat sebesar 6 sampai dengan 8%, tidak terjadi kelangkaan ikan dan kenaikan harga di pasaran. Kami juga meminta Pak Menteri untuk menjaga stabilitas harga terutama konsumsi agar masyarakat dapat membelinya dengan harga terjangkau.

Nah kemudian ada pengalaman yang kurang baik nih Pak Menteri. Di Cidaun baru saja disosialisasikan tentang Bulan Bakti Nelayan, tapi mohon maaf berasnya itu jelek sekali Pak, kuning. Kemudian stok ikan dinyatakan cukup, akan tetapi kondisi di lapangan saat ini nelayan di beberapa daerah kesulitan mendapatkan solar Pak untuk melaut. Jadi mohon ada prioritas terutama di daerah Sinjai, Polewali Mandar dan daerahnya Pak Ketua ini di Lampung yang beberapa hari ini dikabarkan tidak melaut, nah untuk itu mohon tanggapan Pak Menteri bagaimana strategi yang dilakukan nelayan sebagai pelaku yang mandiri dan berpenghasilan rendah.

Yang ketiga, Partai Gerindra terus mengingatkan dan meminta kepada Pak Dirjen Perikanan Budidaya untuk melakukan penelitian terhadap fenomena kematian ikan secara massal yang terjadi hampir setiap tahun di tempat beberapa Waduk seperti Waduk Cirata-Cianjur, Jatiluhur-Purwakarta, Singkarak-Sumatera Barat, dan beberapa Waduk lainnya di Indonesia yang mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak ikan. Kami juga meminta agar diadakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada petambak ikan, juga tentang asuransi Pak ini penting sekali.

Dengan tema RKP Rencana Kerja Prioritas tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kami dari Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan karena ada anggaran Rp70 miliar untuk mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan dan menjamin masuknya kategori PN-II Prioritas Nasional ke-2.

Nah semuanya ada 13 poin, tapi yang saya bacakan hanya beberapa Pak. Terutama tentang rencana zonasi kawasan, nah ini juga perlu perhatian. Kemudian rencana perikanan tangkap tentang sarpras di Kalaju sebanyak 250 lokasi. Kemudian tentang asuransi tadi yang sudah saya kemukakan. Dan yang terakhir Pak, perlu melakukan percepatan terhadap operasionalisasi pelabuhan terutama Pelabuhan Kejawan Pak. Saya malu

nih Pak, karena dulu wakafnya ayah saya tapi sekarang tidak tertata dengan baik.

Jadi demikian Pak Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI. Mohon tanggapan dari Pak Menteri.

Terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih Bu Endang.

Tadi saya dengar masalah kematian ikan di beberapa Waduk. Dirjen mana bakal bisa nanganin kalau tidak ada kerja sama dengan petambaknya. Petambaknya berpikirnya gini, saya kasih makan yang banyak, lebih banyak lebih bagus, cepat besar. Tetapi akan menjadi amoniak di dalam air, itu yang menyebabkan keracunan ikan. Betul *nggak* Pak Menteri? Pak Menteri jangan ngelamun Pak Menteri. Pak Menteri bawa air minumnya aja beda nih.

Selanjutnya Mbak Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Selamat untuk para pejabat yang baru dilantik, semoga bisa bekerja sama dengan baik dengan Komisi IV sebagai mitra kerja. Tuh di *amin*-annya banyak Pak Menteri berarti selama ini kurang baik.

Saya pertama ada beberapa kalau di catatan saya kurang lebih ada 7 *pointers* Pak Menteri. Pertama saya terima kasih respon cepat dari Pak Sekjen waktu itu terkait SK Penyuluh Perikanan bantu yang sempat mandek ya dan terima kasih sudah selesai. Mungkin ini juga menjadi catatan temuan saya di lapangan Pak Menteri, banyak sekali penyuluh itu ternyata tidak sesuai tinggalnya di mana, tempatnya juga kerjanya di mana. Pada saat kita cek lokasi, saya memang suka datang tiba-tiba kayak "Jelangkung" gitu Pak, datang tak diundang pulang tak diantar kan, nah terus tiba-tiba itu bantuan yang Bapak berikan melalui alokasi dana reguler atau DAK ini tidak tepat semua. Jadi saya kemarin menemukan permasalahan tersebut bagaimana tidak sinkronnya antara para penyuluh yang merasa, "oh ya kami orang Kementerian, jadi tidak koordinasi dengan Dinas", jadi ini teknis. Itu mungkin di bawah BRUPP ya itu ya mungkin ya. Jadi ya Pak Itjen ya bener *nggak* sih ya, jadi oh ya jadi SDM mungkin menjadi perhatian itu. Contoh juga ada yang tugasnya di Kerinci, tapi tinggalnya malah di mana di Palembang, ini bagaimana. Jadi *nggak* nyambung gitu loh maksudnya, harusnya *standby on*

location lah ya kan karena supaya lebih memahami kearifan lokal dan lain-lain ini kan harus menjadi karakter ya ini, itu pertama.

Kemudian saya ingin mereview kembali juga untuk masalah *broodstock* yang ada di wilayah mungkin ada di Sumbar, ada di Lampung, ada di Sumsel, ada juga di Kalbar. Tapi yang menjadi perhatian Pak, saya sekali lagi mengingatkan banyaknya barang-barang mangkrak ini, saya udah ngingetin nih. Contoh pasar ikan modern itu sekarang jadi entah pasar apa *nggak* jelas padahal udah dari jauh-jauh hari, nah jangan sampai *broodstock* yang sudah berabad-abad ini *nggak* jalan lagi. Karena gini Pak, dari dari wilayah-wilayah ke Sungai Gelam itu kan jauh, pantas saja ikannya mati. Kemarin saya cek saya ketemu banyak sekali ikan yang syok, *nggak* usah kan ikan Pak saya manusia aja bolak-balik syok Pak apalagi ikan kan gitu karena jalannya *Alhamdulillah* Pak sampai putus sekarang antara wilayah-wilayah tertentu. Nah jadi nanti kan Bapak juga rugi untuk pengadaan ikannya akhirnya, karena apa? banyak ikan-ikan yang mabuk di jalan ya itu. Jadi *broodstock* ini Pak harapannya bisa meng-cover wilayah bawah, Sumatera Selatan ke bawah ke samping kanan kiri kan begitu, nah yang Sungai Gelam itu bisa ke atas.

Jadi saya mohon dengan sangat, kami mau men-*support* kerja KKP ya supaya masyarakat merasakan gitu loh. Jadi saya harap *broodstock* ini anggarannya oke lah sekarang saya juga keterbatasan anggaran saya paham, tapi tolong juga konsisten untuk dilaksanakan ya Pak TB ya ini punya. Jadi terima kasih Pak TB direspon walaupun dicicil ya karena anggarannya terbatas tapi *skill of priority* perlu saya sampaikan itu yang penting untuk disampaikan.

Kemudian dengan saya lihat kan di halaman berapa sih tadi, halaman programnya Pak Menteri ini di halaman 26 kembali di Perikanan Budidaya. Tolong Pak untuk eks Wahyu Mandira yang ada di wilayah Sumatera Selatan programnya itu mungkin bisa disinkronkan ya di Sumsel itu ada eks Wahyu Mandira ya, di halaman 26 terkait sebentar mungkin Bapak/Ibu 65 klaster ya pembangunan tambak dan ini. Mungkin *someday* Pak kalau memang berkenan ini kan sudah *existing*, apakah *visible* untuk dihidupkan daripada bikin baru kan saya sering bilang ya daripada bikin baru pasti revitalisasi mungkin ada juga yang masih bisa *low budget high impact* Pak gitu loh maksudnya ya jadi seperti itu.

Kemudian ini Pak Zaini artisnya nih. Pak Zaini, Alat tangkap ya kemarin terima kasih sudah dikirim Pak direktornya, tapi kok Pak direktornya tidak cukup kooperatif. Saya tadi sempat diskusi bahwa cantrang itu kan merusak, tapi solusinya apa gitu loh kayak Pak Adin yang waktu itu kan juga dikirim dari PSDKP mungkin sudah laporan Dir Airud datang kita ini mau mencari solusi supaya hal-hal teknis ini menjadi perhatian kita bersama.

Kemudian terakhir ini Pak masalah pakan. Pak senior saya Pak Mindo itu sudah berapa kali menginformasikan ada banyak hal terkait pakan yang alami ya, nah tapi pakan alami misalkan memang tidak ada alokasi untuk pakan apa pabrik pakan mungkin untuk pakan alami ini bisa di-*adjusting* di

anggaran Bapak ke depan karena hampir mayoritas itu permasalahan pakan. Bapak boleh cek sendiri deh itu sama Pak pasukan Bapak di lapangan nah.

Sorry satu lagi saya lupa. Ada masalah *roadmap* spasial, jadi wilayah perikanan ini kalau bisa jangan hanya bicara ruang laut, tapi juga perikanan darat. Supaya apa? *stocking* ikan yang di perikanan darat ini juga bisa terakomodir untuk distribusinya.

Terima kasih Pimpinan, karena udah pegang *mic*.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Selanjutnya Pak Abdullah Tuasikal.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Pak Menteri Perikanan dan Kelautan, Pak Sekjen, beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Fraksi Partai Nasdem memahami bahwa dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional dibutuhkan perhatian khusus untuk memastikan ketersediaan dan menjamin stok pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Tentu saja peran Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu menjamin ketersediaan ikan untuk memenuhi permintaan yang meningkat saat Ramadhan dan Idul Fitri.

Pada rapat kerja kali ini Fraksi Partai Nasdem akan mencermati beberapa hal, di antaranya ketidaksediaan stok ikan menjelang Ramadhan hari besar keagamaan nasional. Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 3 tahun terakhir 2019-2021 mampu memenuhi kebutuhan ikan saat Ramadhan dan Idul Fitri, begitu pula ketersediaan ikan dari estimasi produksi tangkap dan budidaya dan yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022.

Terkait pasokan ikan menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022, Fraksi Partai Nasdem meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memperhatikan kestabilan pasokan. Pada bulan Ramadhan pemerintah biasanya mengalami peningkatan justru pada saat nelayan tidak melaut, yaitu minggu pertama puasa dan saat lebaran dan berbagai hari setelahnya, kondisi tersebut sering menimbulkan kenaikan harga ikan. Untuk Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan antisipasi dengan mengoptimalkan produksi ikan budidaya disertai dengan

perbaikan sistem penyimpanan sehingga menambahkan masa simpan produksi perikanan untuk menjamin pasokan ikan pada saat menurunnya produksi perikanan tangkap karena nelayan tidak melaut.

Terkait program prioritas tahun 2023, Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberi perhatian pada komoditas rumput laut yang dalam 7 tahun terakhir mengalami penurunan produksi, untuk itu upaya peningkatan produksi melalui pengembangan usaha budidaya dan industri rumput laut perlu terus ditingkatkan, mengingat sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan sumber pendapatan mereka pada budidaya rumput laut.

Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pemangku tanggung jawab produksi garam nasional untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional. Kami berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan prioritas pada program kegiatan yang terkait dengan peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas garam dalam negeri melalui bantuan sarana dan prasarana maupun dukungan ... (*suara tidak jelas*).

Pak Ketua, Pak Menteri, jajaran yang saya hormati.

Hari ini saya mau coba menyampaikan aspirasi bahkan kondisi terakhir yang ada di Maluku, masyarakat dengan Pemerintah Daerah, legislatif, maupun Kementerian terkait. Kita tahu bahwa dari awal potensi 3 WPP di Maluku kurang lebih sekitar 37 ya 3b *tiga puluh tujuh koma sekian persen*. Ini sehingga pada saat pemerintahan SBY itu maka Maluku dirancang untuk menjadi Lumbung Ikan Nasional, saya kira potensi sudah ada pada Menteri beserta jajarannya. Dari proses-proses itu, itu maka Pemerintah Daerah beserta Kementerian terkait lalu memproses Rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional dan pada saat itu Menkonya Pak Rizal Ramli, ini datanya udah ada, referensinya juga jelas, dan Rancangan Peraturan Presiden itu sudah mungkin ada pada Segneg, tapi belum di paraf oleh Ibu Menteri pada saat itu. Jadi sekarang sudah 3 Menteri ya jadi Pak Menteri Kelautan hari ini jadi sudah 3 Menteri, padahal Rancangan Peraturan Presiden tinggal aja dilanjutkan selesai. Ya Pak Menteri ya, dari awal dari Komisi IV sudah memberikan dukungan untuk Lumbung Ikan Nasional dukungan dana Rp1,5 triliun dari *tiga sekian triliun* dari APBN untuk mendukung Lumbung Ikan Nasional.

Yang kedua terakhir yang ketiga kalinya itu adalah dukungan dari Komisi IV itu agar mempercepat regulasi ya dengan peta regulasi, sejauh mana dengan referensi yang tadi, progresnya seperti apa, sehingga bisa terwujud Peraturan Presiden untuk masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku berpikir bahwa kita ya termasuk dalam 8 Provinsi itu yang ada menjadi Negara Republik Indonesia, apa kata mereka? "Kami tidak beda dengan Aceh, kami tidak beda dengan Papua, tapi kami ini adalah NKRI harga mati". Pernah terjadi kondisi sosial di Maluku Pak Menteri tahu itu dan kita hindari jangan sampai ada tumbukan-tumbukan yang lain.

Mungkin Pak Ketua saya minta waktu dikit lagi. Tanggal 22 Februari kemarin kita ketemu dengan..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Satu menit lagi ya Pak Abdullah Tuasikal ya.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Iya. Pak Menko Luhut, apa yang dikata oleh Pak Luhut? Kondisi yang di Wai kita tidak lagi kita ke sana, apakah itu karena ada ada apa namanya ada ranjau atau ada gunung api laut kita tidak ke situ apa referensinya yang seperti apa. Untuk itu saya berpikir bahwa apa yang dikatakan Pak Luhut dan lokasi Ambon *New Port* mau digeser ke Yos Sudarso silakan aja, tapi komitmen kita terhadap Lumbung Ikan Nasional saya kira kita harus bisa Pak Menteri. Pak Menteri berpikir khusus untuk Lumbung Ikan Nasional, mempercepat Peraturan Presiden, agar apa? penangkapan terukur yang apakah udah jadi Peraturan Menteri atau rancangannya saya kira mari ya Pak Menteri dari itu aja jadi jadi pikiran masyarakat. Juga mungkin Pak Ketua, saya kira Rancangan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri tentang penangkapan terukur agar juga harus tersosialisasikan.

Untuk di hari ini Pak Menteri kan sampai sekarang selama Pak Menteri ada kita singgung soal Lumbung Ikan Nasional soal Perpres Pak Menteri tidak pernah menjelaskan. Kami sadar bahwa negara tidak memiliki uang, kita sudah sepakat 1,5 triliun tidak bisa karena ada *refocusing*, kami orang Maluku tidak segitu, kami hanya minta Peraturan Presiden.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup Pak Tuasikal.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Pak Ketua. Saya kira terakhir saya minta dukungan dari Pak Ketua agar dengan teman-teman Anggota agar masyarakat Maluku bisa terobati dan bisa disejajarkan, dibagi kesenangannya ya ditingkatkan kesejahteraannya. Saya kira gitu Pak Menteri ya.

Saya kira demikian. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya sepakat dengan Pak Abdullah Tuasikal, tapi masalahnya bantu doa Pak supaya 15 T-nya dapat. Kalau *nggak* dapat kan mau pakai ini, mau pakai itu, pemerintah bukannya *nggak* punya uang, uangnya tidak cukup itu ya.

Selanjutnya Pak Haerudin.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Pak Ketua. Saya itu aja, kita belum ke sana, saya minta untuk Perpresnya dipercepat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke. Ya Pak Menteri dengar ya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Terima kasih Ketua.

Pimpinan yang terhormat,
Anggota yang terhormat,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya juga yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri ingin kami sampaikan bahwa konsentrasi kita di budidaya ikan itu memang tidak bisa dianggap remeh sekarang karena keamanan pangan kita itu memang menjadi tujuan. Hari ini kita penentuan apa kita bangkit dari pangan atau kita terpuruk dari pangan. Kebetulan Komisi IV ini adalah Mitra kita itu memang Komisi yang membidangi pangan salah satunya KKP, mudah-mudahan program yang tadi tergambar itu adalah bisa menjungkit pangan kita dari sektor Kelautan.

Ada hal yang berapa harus kami sampaikan pemaksimalan budidaya perikanan itu yang di darat memang pilihan-pilihan yang lebih strategis hari ini karena yang Kelautan itu butuh proses perapihan, terutama kami berapa hari lalu melihat kapal-kapal asing masih masuk ke perairan kita dan itu mereka makin masif, bagaimana pola pengamanan kita? Betul kata Ketua Sudin, pengajuan anggaran jauh lebih besar dulu, tapi harus diyakinkan dalam trilateral *meeting*-nya. Yakinkan Bappenas-nya, diyakinkan Kemenkeu-nya bahwa menjaga laut kita itu tidak sederhana dan modalnya juga butuh maksimal mengamankan laut kita itu. Nah anggaran kita ke depan didorong tapi memang baik Bappenas maupun Kemenkeu dan Presiden tentunya butuh diyakinkan secara maksimal, itu yang..

Yang kedua kapal-kapal kita juga yang punya izin juga harus dirapihkan. Jadi kalau izinnya satu jangan dipakai 10 kapal, tapi jangan sampai kita 'keras' ke dalam sementara ke luar 'lembek'. Bersikap sebenarnya percaya dan ada doanya namanya sakti itu betul-betul menjadi kekuatan yang tak tertandingi KKP hebat *aamiin*.

Yang terakhir dari kami Pak Menteri. Tentu ada dari Dapil di Tasik Selatan itu ada lahan ada asosiasi petani apa petambak ikan rakyat, ada luas

lahannya 110 hektar, petambaknya 80 orang yang teridentifikasi mungkin yang tidak belum terdaftar masih ada dan memang tambaknya rusak butuh dorongan secara maksimal. Pikiran saya sederhana, dari daripada kita membuat tambak baru, tambak yang ada kita potensikan dan saya salah satunya adalah yang mendorong dari dulu bagaimana KKP mengidentifikasi menginventarisir tambak-tambak rakyat di mana pun. Daripada kita membuat tambak baru dengan harga yang sangat mahal, lebih baik membuatkan sentra-sentra itu betul-betul disiplin Pak TB ke depan.

Yang paling terakhir nih Bapak artis ini Dirjen kita ini Pak Menteri, Pak Zaini ini. Informasinya 'harum semerbak', tapi kenyataan programnya susah kita ini. Kita butuh sampaikan, memang betul meningkatkan para nelayan kita itu terutama ditingkatkan juga kapal-kapalnya, tapi kalau sarana prasarannya itu tidak ada. Di kita di Jabar Selatan nelayan itu banyak, Pelabuhan terbatas, yang mampu menampung apa 5.000 GT aja hanya Pangandaran sama Sukabumi, sementara sepanjang Selatan Jawa Barat itu begitu luas dan banyak nelayannya dan tentu juga banyak keluarganya, butuh pemberdayaan. Maka di sana itu untuk penanganan sementara itu butuh ketinting apa kapal-kapal kecil perahu-perahu kecil yang jaraknya memang tidak besar.

Yang terakhir yang paling terakhir hari ini ke Pak Zaini ini.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi terakhir lagi nih, udah 3 kali terakhir ya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Paling terakhir lagi Pak Ketua.

Mohon lebih lebih apa lebih realistis melihat itu, lebih realistis lagi. Ini kan kita di sini wakil rakyat, melihat mereka, mendengar mereka, dan harus saya sampaikan yang salah satunya saya sampaikan ke Pak Sekjen videonya sampai hari belum ada realisasi perbaikan gagalnya apa pembangunan pemecah gelombang di Pelabuhan Cimanuk. Mohon jadi catatan untuk semua, doa kami menyertai Pak Menteri beserta jajarannya semoga KP-KP kita bangkit dan hebat.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Suhardi Duka. Silakan. Jangan pakai terakhir Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua,

Anggota Dewan yang terhormat,
Pak Menteri yang saya hormati,
Pak Sekjen dan jajaran Eselon I.

Saya ingin garisbawahi penyampaian Pak Haerudin tadi. “Keras ke dalam lembek ke luar”, saya kira harus keras dua-duanya atau lembek dua-duanya Pak Haerudin ini, pilihan ya.

Saya setuju Pak Menteri mengajukan sampai dengan Rp15 triliun untuk 2023 karena memang KKP ini kita butuh banyak, potensinya besar tapi dukungan anggarannya kecil. Jadi memang kita semua bersama dengan Komisi IV Badan Anggaran saya kira kita perlu *support* untuk bersama-sama meningkatkan anggaran Kementerian KKP. Langkah yang dilakukan oleh KKP terhadap WPP ya, setelah kita mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri memang kemarin banyak yang pertanyakan dan memang kalau kita ingin meningkatkan PNBPN, saya kira langkah yang di ide dari Pak Menteri ini perlu kita *support*. Pertanyaan saya sekarang sudah sejauh mana ini ya, sudah adakah investasi yang ingin mencoba masuk, ingin menawarkan wilayah-wilayah tersebut, dan kita harap bahwa jangan hanya bermain di hulu tapi sampai ke hilir. Ya kalau ini mampu kita lakukan, saya kira rantai ekonominya berjalan bagus dan pendapatannya juga untuk masyarakat juga bisa menyerap tenaga kerja yang cukup.

Yang selanjutnya saya ingin juga sedikit menggarisbawahi lagi apa yang disampaikan tadi Pak Ketua mengenai hasil temuan BPK terhadap pupuk bersubsidi untuk nelayan. Ini kan kalau e-RDKK.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bukan untuk nelayan Pak, untuk petambak ikan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Untuk petambak ya untuk petambak. Ini kan untuk e-RDKK kan tidak bisa di di apa namanya mau berpedoman pada e-RDKK yang di Kementerian Pertanian sehingga dengan demikian langkahnya sekarang ini apakah Pak Menteri Perikanan dapat alokasi khusus dari Kementerian Keuangan untuk pupuk subsidi ya khusus untuk petambak ini, ataukah masih tetap mengambil alokasi pupuk subsidi ada sekarang. Kita harapkan bahwa alokasi pupuk subsidi itu bertambah khusus untuk para petambak jadi dengan demikian tidak mengurangi dari sisi alokasi yang ada di Kementerian Pertanian, tapi kalau tidak juga ya apa boleh buat karena memang kemampuan negara kita lagi tidak sesuai apa yang kita harapkan.

Yang selanjutnya Pak Menteri. 2021 itu ada alokasi untuk Sulawesi Barat 10 Kapal, tapi karena memang di sana bodoh *ndak* bisa membelanjakan, dikembalikan itu dananya Pak Zaini ya? Dikembalikan. 2022 di bawa lagi ke sana kalau *ndak* salah. Saya pikir jangan lagi dibawa ke tempat yang sama, saya minta supaya tugas pembantuannya langsung ke Kabupaten, Kabupaten lebih pintar daripada Provinsinya itu iya. Ya kok dikembalikan, dikasih Rp10 miliar dikembalikan, waduh, sedangkan

Kabupaten itu butuh sekali. Nah kalau *ndak* salah tinggal Rp5 miliar ya untuk 2022 ini, langsung saja ke Kabupaten Pak Zaini jangan lagi ke Provinsi supaya bisa dibelanjakan, dibutuhkan sekali masyarakat di sana ini.

Selanjutnya bimtek, kita akan melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Perikanan termasuk Gemarikan, Hari Bakti, dan lain sebagainya. Tolonglah gunakanlah perangkat KKP yang ada di daerah, tidak pakai menggunakan EO yang punya penampilan pakai topi lah, pakai apa lah apa itu, iya itu *ndak* lebih banyak anggaran dipakai EO daripada dinikmati oleh masyarakat, gunakanlah gitu yang ada di daerah.

Terima kasih Pak Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau *nggak* pakai topi nanti kepanasan.

Selanjutnya Pak Andi Akmal.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi, dan
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Pak Menteri, Pak Sekjen, dan Pak Dirjen di jajaran Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yang pertama Pak Menteri dari Fraksi PKS Pak memberikan apresiasi ini banyak ide-ide dan banyak terobosan dari Pak Menteri ini yang telah dilakukan dan kita melihat bahwa ide-ide tersebut memang masih menimbulkan pro kontra Pak, saya kira wajar ya. Makanya saya setuju dengan Pak Abdullah tadi bahwa Bapak ini sosialisasinya harus lebih masif Pak, niat Bapak baik tapi dalam implementasinya mungkin banyak perlu dipahami sehingga tentu banyak temuan kami di lapangan Pak Menteri yang menginformasi bahwa hal ini memang belum dipahami oleh terutama Pemerintahan Daerah dan masyarakat kita di daerah.

Nah tentang masalah penangkapan ikan terukur misalnya Pak ya, ini kan saya kira sangat bagus tujuannya kalau kita baca. Namun di daerah ternyata kan masih banyak yang belum memahami seperti apa ini perizinannya ya gitu kan, Pak Dirjen Perikanan Tangkap ini memang harus memberikan gambaran Pak ya atau sosialisasi bahwa harusnya dengan ide ini perizinan lebih mudah harusnya Pak, ya kan gitu ya harusnya kan ini harusnya lebih lebih mudah. Kemudian yang kedua sendiri Pemda sendiri

juga mereka dapat dapat apa? Ini kan perlu penjelasan juga Pak, Pemerintahan daerah itu dapat apa. Kemudian yang selanjutnya bahwa gimana risiko jual beli tadi Pak jual beli apa namanya perizinan, artinya yang kecil atau koperasi tanda kutip Pak ya menjual ke pengusaha besar ini gimana pengawasannya. Nah saya kira perlu Pak di ini di apa betul-betul diperhatikan sehingga niat baik tadi itu betul-betul apa berdampak untuk nelayan kita gitu, nah terutama nelayan kecil kita. Itu yang pertama Pak Menteri.

Yang kedua kalau kita melihat Kepmen Kementerian Kelautan Perikanan nomor 58 Pak ya tahun 2020 Usaha Perikanan Tangkap Pasal 104 yang membolehkan Alih Muatan (*Transshipment*), nah ini kan apa kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Pak ya ini kan dibolehkan kalau kita baca di Kepmennya atau mungkin nanti bisa ditanggapi. Ini dianggap ini merugikan kepentingan daerah Pak karena katanya tidak dapat retribusi di TPI-nya, mungkin ini perlu penjelasan lagi kepada apa Pemerintahan Daerah. Ya Pak ya, ini yang kedua.

Yang ketiga, kita melihat Pak di dalam apa namanya Undang-Undang Perikanan ya nomor 45 tahun 2009 di mana di dalam undang-undang itu mewajibkan anak buah kapal Pak ya kepada investornya ada yang punya perusahaan asing itu 70% minimal ABK-nya, ABK-nya Pak untuk kapal asing nih yang menangkap di ZEE gitu ya, tapi kan di Undang-Undang Cipta Kerja dihapuskan ini Pak. Nah Pak Menteri saya mendengar Raker kemarin sangat konsen Pak ya bagaimana ABK kita ini ABK ini betul-betul diisi oleh warga lokal. Nah dengan dicabutnya oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini gimana Pak dasar hukumnya nih, mungkin nanti ada penjelasan supaya ide Pak Menteri tadi itu niat Pak Menteri itu betul-betul bisa dilaksanakan Pak. Jangan karena ada Undang-Undang Cipta Kerja sehingga nanti ABK-ABK ini orang asing nantinya nih yang memenuhi kapal-kapal Pak terutama kapal-kapal yang besar itu, ini ada penjelasan dari Pak Menteri ya.

Yang keempat, Pak Menteri ke depannya ini mungkin untuk tahun depan karena tahun ini anggaran terbatas. Program nelayan tradisional atau nelayan kecil ini Pak ini perlu perhatian khusus nih. Kalau yang Bapak sampaikan ide-idenya itu kan bagaimana nelayan-nelayan yang sudah cukup maju ya, nah saya kira kita dukung. Ini sekarang bagaimana program-program bantuan untuk nelayan tradisional atau kecil ini? yang kecil-kecil Pak Menteri tapi banyak nih. Misalnya kan kita punya ekspor rumput laut luar biasa Pak, tapi pernah *nggak* kita membantu para nelayan atau petambak apa namanya petani rumput laut ini kan *nggak*, artinya bantuan langsung maksud saya Pak. Nah kita kan bisa bantu dengan talinya Pak Menteri atau dengan apa pelampungnya, ini kan kecil tapi dinikmati langsung oleh mereka gitu. Nah itu seperti contohnya tapi untuk tahun depan Pak Menteri ya kita bisa usahakan.

Kemudian saya kira itu yang, kemudian aspirasi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Masih panjang Pak Andi?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ya?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Masih panjang?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Sebentar lagi Pak Ketua, ada aspirasi 2 ini saya sampaikan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

1 menit.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

2 menit lah.

Pertama dari kunjungan Komisi kemarin Pak Menteri, Pak Ketua Komisi kemarin ke Makassar itu. Saya kira karantina perikanan kita luar biasa sebenarnya kerjanya Pak Menteri ini dan Ekspor kita kan dari Sulsel itu didominasi oleh ekspor laut hasil laut, namun fasilitas di karantina kita di Makassar itu perlu ditingkatkan ya misalnya mesin *x-ray* nya kemarin kita temukan di sana masih kurang. Termasuk juga Pak Menteri di Politeknik Kelautan Perikanan di Bone, ini luar biasa lulusannya itu hanya 2 bulan menganggur langsung diserap oleh lapangan kerja. Namun kita melihat fasilitas sarana prasarana ini ada Pak apa Kepala Badan baru SDM Pak ya, Poltek di Bone ini Pak perlu dibantu sarana prasarana agar mahasiswa kita ini yang yang vokasi ini betul-betul selain ilmunya, pengalamannya Pak dengan apa namanya bantuan lab ataupun alat-alat peraga yang dibutuhkan oleh mereka.

Yang terakhir Pak Ketua, ini terakhir ini. Ada aspirasi masuk ke fraksi kami Pak Pak Menteri atau mungkin nanti ke Dirjen Budidaya atau Pak Irjen tentang tunggakan pembayaran mesin pembuat pakan, ini sebenarnya Direktorat Pakan dan Ikan ya tentang *refocusing* sebenarnya masalah ini karena ada *refocusing* dulu Pak ya. Ini perlu kami sampaikan agar diberikan perhatian Pak jangan merugikan daripada apa namanya pengusaha kita yang sudah menyiapkan tadi tapi belum dibayar ya mungkin masalah teknis, tapi ini menjadi atensi kami untuk apa Ditjen Budidaya dan Itjen Pak ya untuk betul-betul diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau tadi bicara ekspor, saya senang sekali dengarnya. Tapi Pak Menteri ini terlampau jujur, *nggak* pernah gembor-gembor ekspornya. Beda sama yang kemarin kita rapat kerja, 1 tahun 7 kali ekspor Nusantara, ekspor Merdeka, ekspor ini, coba dicek isinya apa? coba tanya Bea Cukai apa isinya. Ekspor meningkat ya *nggak* usah ngomong, yang meningkat kan harga CPO, bukan lain-lain.

Sama satu lagi saya ingatkan Kementerian, setiap mengeluarkan Permen, setiap mengeluarkan Peraturan mohon kami diinformasikan, diberikan *copy*-nya agar nanti teman-teman kalau pulang ke Dapil tahu dan paham ya.

Selanjutnya Pak Salim. 2 menit, apa 3 menit? ya bagus.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Terima kasih Pak Ketua. Tadi dua Pimpinan dari Lampung dua-dua terjadi KKN di depan.

Pak Menteri yang kami hormati,
Pak Sekjen dan teman-teman Eselon I.

Saya langsung saja Pak Ketua. Sudah 402 hari Pak Ketua sama hari ini kunjungan kita Pak Darori ke Provinsi Aceh sudah ada tindak lanjut nih, akan tetapi Pak Menteri perlu kami beri masukan kunjungan kami tersebut Pak Ketua sampai hari ini 402 hari, saya hafal betul itu. Syukur *Alhamdulillah* hari ini sudah ada jawaban, namun jawaban ini sangat kita sayangkan hanya sekedar retorika Pak Menteri. Baru saya kontak Kepala Dinas Perikanan Provinsi Aceh yang menyatakan ini jawaban sangat klasik Ketua, karena hari itu di bawah Pimpinan Pak Dedi Mulyadi menjanjikan dengan pelaku perikanan di lokasi tersebut.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang janji Pimpinan Anda atau Kementerian? supaya jelas.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Pimpinan dihadiri oleh Dirjen.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oh.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Namun sudah 402 hari baru ada menjawab respon. Saya tanya tadi Pak Zaini Bapak *ndak* pernah koordinasi masalah jawaban ini dengan Kepala Dinas. Ini kan seolah-olah *you* siapkan dokumen, baru kita tindaklanjuti.

Malah Kepala Dinasnya baru WA saya, ini baru lihatnya dokumennya. Makanya yang model-model begini Pak Menteri, ini Dewan, Lembaga Lembaga resmi, jangan asal jawab. Kalau *nggak* ada *nggak* apa-apa, biarlah Bapak kasih mohon maaf kawan-kawan ke Timur sana triliunan. Hanya mengeruk Rp40 miliar dana tidak ada, untuk apa reses Ketua. Ini *ndak* ada, ini jawaban tidak benar ini. Ini Pak Darori ikut, banyak saksinya. Baru saya kontak ada buktinya Pak. Tidak, malah dinasnya ini kan seolah-olah siapkan dulu dokumen, betul benar secara administrasi, namun Dinasnya *ndak* ada Pak Sekjen bohong ini. Dirjen pembohong ini.

Selanjutnya. Berapa kali sudah kita sampaikan Pak, di Aceh ada Balai Perikanan Darat cuman pusatnya di Jambi, antara daerah kami dan Jambi Pak Ketua tiga hari tiga malam Pak Ketua. Kalau ada program, contoh bibit indukan kalau dibawa dari Jambi di jalan aja sudah mati Ketua dan Pak Sekjen bibitan ikan, indukan ikan yang dari Jambi tidak bagus Pak. Mana ada yang bibitnya bilangny sudah di apa diolah di apa pendek, kecil, lebar, itu bukan bibitan Pak. Kalaulah bisa sekedar masukan Pak Menteri, di lokasi kami sana yang bisa dikembangkan Ikan Jurung Pak, kalau Ikan Jurung ini yakinlah Bapak karena Sungai kami di sana banyak batu-batuan yang sesuai dengan hidup berkehidupan di daerah tersebut.

Selanjutnya terakhir Pak Ketua. Saran kami kepada pihak dari Kementerian melalui balai-balai yang di Provinsi masing-masing, kalaulah ada kayak bioflok, bantu-bantuan kita bersyukur Pak Menteri. Namun hendaknya dikoordinasikan dengan daerah Pak Ketua, mana mungkin orang Jambi lebih mengetahui di Kabupaten kami sendiri Pak Ketua. Ini ke depannya, bantuan ini kita bersyukur Pak Ketua, sekarang aja kita apresiasi kinerja kawan-kawan dari Kementerian yang sudah melakukan Bimtek, yang sudah melakukan gemar makan ikan itu kita juga saya pun hampir sama sifat saya dengan Pak Ketua, kalau benar itu benar, kalau *ndak* benar itu *ndak*. Macam ini tadi jawaban *ndak* benar, bilang *ndak* benar. Biasalah karena dekat ini sudah dekat Hari Raya Idul Fitri terpaksa kita dengan Pimpinan baik-baik semua.

Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf Pak Menteri kalau ada agak tinggi-tinggi sedikit, maklumlah karena Pak Ketua saya tengok hari ini landai. Kalau dengan Kementan kemarin kita sangka 'pecah' gedung ini Bapak. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Karena gini, jangan pernah bohongin masalah data itu lho data itu tidak boleh bohong, saya kan tahu gitu lho.

Pak Edward Tannur. *To the point.*

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Siap Pak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV beserta rekan-rekan Anggota Komisi IV,
Bapak Menteri beserta jajarannya.

Saya kok punya peribahasa ya, “tidur satu ranjang tapi kita mimpinya berbeda”, nikmatnya juga berbeda. Itu tidur satu ranjang.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau Bapak, Bapak mimpinya pasti yang nikmat-nikmat, kalau istri Bapak belum tentu Pak.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Tapi saya biasanya ngerem-ngerem sedikit Pak Ketua, jangan terlalu vulgar.

Jadi begini, seperti teman-teman yang tadi sampaikan kita beri apresiasi kepada Bapak Menteri mengenai kesiapan pangan terlebih ikan untuk lebaran, setuju? ya apa yang sudah di prognosa kan itu saya setuju aja karena itu perkiraan yang wajar.

Yang kedua mengenai konsumsi ikan ini memang trennya meningkat tahun ke tahun meningkat, cuma yang disayangkan dari KKP ini mendapat alokasi dana yang terlalu minim ya padahal potensinya besar. Apakah orang-orang ini matanya buta atau otaknya miring atau gimana ya, ini jelas-jelas punya potensi hasilnya hasil lautnya berlimpah, tapi dananya yang dikasih kecil, penghasilan dari KKP ini cukup besar. Ini juga kita mau berpikir secara akal sehat juga salah, berpikir secara akal tidak sehat juga salah, ya kita coba pelajari mengikuti perkembangan ini. Memang saya lihat anggarannya di sini Rp15 triliun ini wajar, ya kita tahu sendiri Pak Menteri ini kan latar belakangnya seorang pengusaha, pengusaha itu dia melihat peluang. Jadi ada peluang dia cepat merebut peluang itu, tapi di lapangan ini tidak seindah yang kita bayangkan. Seperti tahun lalu Pak Sekjen menjanjikan bahwa kegiatan akan dilakukan sejak awal tahun, setuju, dan ada beberapa yang sudah dilakukan. Cuma saya lebih tekankan bantuan-bantuan yang berupa bioflok dan lain-lain seperti benih ikan itu tolong diprioritaskan duluan karena itu menyangkut apa hajat hidup masyarakat di bawah, sehingga mereka biarlah diberi kegiatan. Kalau mereka nganggur nanti pikirannya bermacam-macam timbul ini yang kita harus prioritaskan. Kalau anggarannya sudah ada kucur aja sudah, genjot aja sudah, supaya kita jangan kena lagi *refocusing*. Kita minta anggaran tinggi, tapi anggaran yang ada saja belum dimanfaatkan kita rencana mau tinggi.

Dan satu lagi Pak Menteri, kita perlu memberi perhatian khusus di daerah-daerah terpencil. Memang nelayan yang di sana kebanyakan nelayannya lemah lembut, udah otaknya *nggak* terlalu cerdas, udah fasilitas *nggak* cerdas, *nggak* mencukupi, modalnya juga kurang, jadi saya bilang kita pasrah saja nanti Tuhan tolong saja sudah. Jadi seperti itu, kami daerah Indonesia bagian Timur ini potensinya sangat besar karena kami daerah kepulauan. Berarti melalui forum ini saya minta dengan hormat KKP ini coba

memberikan perhatian khusus ke daerah-daerah terpencil karena daerah-daerah itu masih perawan belum digarap, belum digarap, dan orang-orangnya juga masih polos. Jadi apa Bimtek yang diberikan dan lain-lain dukungan itu pasti mereka akan jalankan karena hidup sudah susah mau macam-macam apalagi, kasih apa ya kerja aja jangan terlalu banyak protes, itu watak dan kepribadian orang-orang di daerah terpencil. Dan mereka itu bukan tertinggal, ditinggalkan, ini yang membuat kita prihatin.

Jadi mengenai bibit sudah saya sudah dengar pada rapat yang lalu Pak Sekjen sudah memberikan apa kesanggupan bahwa untuk merubah bibit ikan budidaya itu jadi 6 sampai 8 ya Pak Sekjen, 6 sampai 8 *centi* ya. Awalnya kan 3,5 sampai 5, jadi itu yang semapat banyak itu yang saya bilang semapat banyak itu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Edward masih lama?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Sedikit lagi Pak, mohon saya diberi waktu sedikit lagi karena ya kami ini kan Daerah Tertinggal baru tampil di DPR mau ngomong, waktu kurang lagi. Mau ngomong sama siapa lagi nih kami. Pak Ketua mohon maaf Pak Ketua, ini kami ngomong di kampung juga *nggak* ada orang yang mau dengar Pak Ketua, jadi biar kami ngomong di sini supaya itu *YouTube* itu dia senter sedikit bahwa orang NTT sudah bisa berbicara lantang di rapat-rapat komisi ini.

Jadi akses permodalan dan mengenai mengenai apa bantuan. Satu lagi Pak saya hampir lupa mengenai kapal 5 Gross Ton itu terus terang dari hati yang terdalam bahwa kami di daerah terpencil ini tidak cocok, tidak cocok untuk kasih kapal model itu nanti pemodal-pemodal pengusaha yang membodohi rakyat kecil. Kasih Ketinting aja, kalau *nggak* kasih Pukat aja, biar mereka bisa. Oh Pukat *nggak* boleh ya, ya Ketinting aja deh.

Dan juga satu lagi. Kalau kita serahkan ke Provinsi nanti jadinya akan terlambat, kalau kita bilang *nggak* terbagi salah, terlambat karena akses informasi dan lain-lain itu sangat terbatas. Jadi mungkin memang masih banyak lagi yang perlu saya bicarakan.

Tapi satu lagi terkait PP nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak itu perlu lebih di digiatkan lagi sosialisasinya karena karena orang di lapangan ini Pak Menteri sudah jelaskan kami di rapat, cuma kami jelaskan kepada masyarakat ini kadang-kadang mereka juga *error* juga. Ini yang kami mohon supaya bisa dimasifkan lagi mengenai sosialisasi ini sehingga tidak menjadi salah sangka atau salah persepsi di dalam masyarakat. Kita punya niat baik belum tentu orang menerima karena orang sekarang otaknya kacau yang paling banyak, jadi kita mau ngomong baik malah dia bilang. Saya minta waktu lagi Pak Ketua. Malah dia bilang, ini bantuan bukan Edward Tannur punya, ini bantuan negara. Saya bilang, lu pergi ambil toh, ambil di Jakarta, ini karena DPR RI bekerjasama

dana aspirasi, ngapain lo persoalkan bahwa ini negara, memang uang ini uang rakyat yang dihimpun oleh negara, memangnya ini Anggota DPR *nggak* mengerti. Sudah *nggak* mengerti mau jadi wakil rakyat lagi apa dah.

Jadi terima kasih banyak Pak Ketua. Mohon maaf kalau penyampaiannya agak panjang, ini penyampaian dari suara hati, dari hati yang terdalam. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tadi apa singkatan yang tadi NTT? *Nggak*, Pak Edward apa tadi singkatannya?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Nanti Trenggono Tolong.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi kalau NTT nanti Trenggono tolong, kalau dia *nggak* menolong dosa, karena orang paling pinggir terpojokan terpinggirkan, miskin pula kan gitu kan. Itu Pak Menteri tolong diperhatikan ya.

Selanjutnya Bu Saadiah. Kita sudah jam hampir jam 12 nih.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Tenang Ketua, masih pagi Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri KKP, para Dirjen Eselon I dan Eselon II yang hadir yang saya hormati.

Saya melakukan pendalaman Pak Ketua.

Pak Menteri saya baru saja pulang dari Kabupaten Kepulauan Aru untuk kegiatan Bakti Nelayan dan Bimbingan Teknis di Kabupaten Kepulauan Aru, makanya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama yang pastinya saya tidak didampingi oleh Kementerian dari Jakarta Pak Zaini, ini catatan. Saya tanya kenapa, katanya karena ada demonstrasi masyarakat yang ada di Aru. Pertanyaan apakah demonstrasi memang harus dihindari dengan tidak hadir ke sana padahal WPP 718 adalah WPP yang paling seksi di negara ini di Kementerian Kelautan dan Perikanan di antara 12 WPP itu Pak Menteri, yaitu WPP 718. Dan oleh karena itu saya dalam Permen Nomor 18 Pak Menteri saya bawa ke sini, di butir 26 itulah asal kenapa masyarakat demonstrasi di sana. Mahasiswa dan ibu-ibu yang datang langsung ke penginapan saya

menyampaikan soal butir Pasal Nomor 26 di Permen KP Nomor 18 tahun 2021 Pasal 26 menyebutkan bahwa jaring udang hela berkantong (*trawl*) diperbolehkan beroperasi hanya untuk kapal dengan ukuran di atas 30GT pada jalur penangkapan ikan II dan III dengan isobat minimal 10 meter di WPP 718 disebutkan di WPP 718. Di sisi yang lain Pasal 3 pada Permen KP ini menyebutkan yang dimaksud jalur I adalah jarak 0 sampai 4 mil laut, jalur II yaitu di luar jalur I sampai dengan 12 mil laut yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Nah di sini kelihatannya terdapat tumpang tindih aturan Pak Menteri khususnya nanti terkait siapa yang berwenang mengeluarkan izin termasuk juga kebijakan pungutan PNBP-nya, selain itu potensi konflik dengan nelayan lokal akan semakin tinggi karena *fishing ground*-nya beririsan. Menurut informasi di lapangan, KKP sudah mengeluarkan beberapa izin kapal dengan Alat tangkap Pukat Hela tersebut untuk beroperasi di WPP 718. Saya ingin ada tanggapannya, ada penjelasannya kepada kami di sini karena yang saya dapatkan dari lapangan sudah disampaikan beberapa foto konflik terjadi di lapangan, kapal-kapal dengan di atas 30GT bahkan 200GT masuk sampai di jalur II dengan jaring *trawl* menyeret jaring-jaring nelayan kecil. Ini tidak boleh terjadi Pak Menteri, benar hati kami menangis melihat hal ini karena masyarakat juga datang menyampaikan ini, harap Permen ini ada revisinya.

Kemudian terkait penangkapan ikan terukur *pasca* PNBP ini perlu dimasukkan juga Pelabuhan Perikanan milik pemerintah daerah Pak Menteri, contoh Pelabuhan Perikanan Dobo yang ada di WPP 718. Nah yang dimasukkan hanya Pelabuhan Perikanan milik pemerintah pusat yang ada di Tual, Pak Menteri, jarak Dobo dengan Tual itu satu hari satu malam kalau dengan kapal Pak. Kemudian juga Pelabuhan swasta yang ada di Benjina. Kenapa Benjina di ambil sebagai Pelabuhan pendaratan, tetapi 2 Pelabuhan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi tidak dimanfaatkan di dalam permen ini. Apakah kita lebih tertarik dengan Pelabuhan swasta dibanding dengan Pelabuhan Pemerintah kita yang ada di sana di Aru? harap agar juga dimasukkan di dalam Permen ini Pak Menteri karena ini sangat berhubungan sekali dengan tadi arus bagaimana penciptaan lapangan kerja kita yang ada di sana. Ibu-ibu yang selama ini menjadi apa ekonominya ada pertumbuhan ekonominya hidup khawatir kalau misalnya dia diarahkan ke Benjina Pak Menteri mungkin sudah tahu gitu di mana Pelabuhan Benjina itu, ada perbudakan-perbudakan cerita masa lalu yang juga sudah masuk dalam rekamannya Pak Menteri begitu. Kita tidak ingin kapal-kapal ini bawa dibawa ke sana sementara ibu-ibu masyarakat Aru ini ada 100.000 orang mereka menyampaikan Pak Menteri dengan sedihnya menangis menyampaikan, kami kalau ada lahan di darat kami bisa mencari kehidupan di sana, tetapi lahan kami ini semuanya ada laut 95% itu laut, jadi lahan-lahan kami untuk menghidupkan keluarga kami untuk nelayan-nelayan kami jangan diambil dari pelabuhan yang ada di Pelabuhan Kabupaten dan Provinsi yang ada di Aru Pak Menteri. Ini catatan.

Yang kedua Pak Ketua. Permen KP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Pasal 104 Pak Zaini, bagian kedua

memperbolehkan Alih Muatan (*transshipment*) di laut antara kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada, sudah di singgung tadi juga oleh Pak Andi. Tetapi ini saya ingin mengangkatnya dalam perspektif tadi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pak Menteri, mungkin selama ini yang disampaikan apakah dia sementara saja karena kemarin masa pandemi Covid ataukah memang akan dilanjutkan seterusnya begitu. Kenapa? karena dia merugikan Kabupaten akibat tidak dapat retribusi dari hasil pelelangan ikan di pelabuhan perikanan, padahal sebelumnya di Permen KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap melarang untuk melakukan *transshipment* di laut. Mohon nanti juga ada penjelasannya dari Pak Menteri.

Yang ketiga ini soal pendalaman jawaban Pak Menteri kemarin saya ada memberikan catatan sedikit. Di Raker kemarin itu Pak Menteri memberikan penjabaran menjelaskan terkait dengan kebijakan penangkapan terukur, yang saya tanyakan, salah satu yang menarik perhatian saya adalah terkait jual beli kuota penangkapan ikan di mana nelayan besar atau industri dapat membeli kuota penangkapan yang dimiliki oleh nelayan kecil atau koperasi nelayan. Nah dalam ini saya kutip bahasa ini dari jawabannya Pak Menteri dan menurut kami praktek ini jika tidak dikawal dengan serius, maka akan menyebabkan *fishing ground* nelayan kecil kita ini dipaksa hilang dari situasi zona penangkapan yang ada Pak Menteri sebagaimana tadi saya sampaikan itu begitu. Jadi di Permen ini disebutkan di sini dengan masuk kepada zona 30GT itu sampai kepada isobot 10 meter itu kita khawatirkan akan terjadi konflik perebutan lahan apa namanya lahan laut kita oleh juga masyarakat kecil.

Satu pertanyaan kritis juga, berapa sih Pak Menteri Pak Zaini jumlah kapal yang ada di dalam aturan ini yang akan diatur masuk ke dalam masing-masing WPP? pertanyaan saya khusus untuk 718 begitu. Di 718 berapa kapal yang diperbolehkan masuk ke sana, dalam satu trayek penangkapan. Yang kedua kontrak kita ini lama waktu untuk kontrak berapa tahun? Satu tahun?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Izin Ibu Saadiah. Kalau bisa diperpendek, udah ini udah lewat dari 3 menit ya.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Ya Pak Ketua. Saya pendalaman jadi agak panjang dikit, tadi kalau Pak Tannur sampaikan kami orang Timur ini ini punya laut jadi minta waktunya agak banyak. Saya kemarin tahan hati tidak bertanya di Menteri Pertanian Pak Ketua, saya simpan untuk KKP.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Begini Ibu, biar teman-teman yang lain sama semua kebagian semua ya.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya mereka sudah sudah ikhlas Pak Ketua, iya. Ini kami ini dikatakain Pak Ketua oleh masyarakat Maluku karena mereka menyampaikan itu Anggota DPR RI Maluku bikin apa saja kok tidak ngomong padahal ada masalah besar. Nah ini karena masalah yang terjadi *real* di masyarakat jadi harus saya sampaikan begitu, jadi ini tidak sekedar hanya pendalaman biasa Pak Ketua mohon maaf. Jadi mohon izin juga saya menyampaikan persoalan ini dan ini sebenarnya bukan persoalan Maluku bagi saya, tetapi persoalan nasional begitu. Nah sehingga tadi yang saya sampaikan Pak Menteri mohon maaf sekali lagi ada beberapa hal yang memang harus disampaikan, mungkin agak langsung ini dari lapangan dan bahasa dari lapangan itulah yang kami sampaikan ke sini.

Poin yang pendalaman yang saya sampaikan karena Pak Ketua juga sudah hadir, Pak Ketua mohon tambahan waktu sedikit ya Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

1 menit Bu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Karena kalau bisa kita akhiri jam 1, kalau bisa. Ya, 1 menit Bu. Silakan.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Oke Pak Ketua. Saya minta 1 menit untuk pendalaman ini dan 1 menit untuk Lumbung Ikan Nasional ya Pak Ketua.

Ya jadi saya langsung di Lumbung Ikan Nasional saja karena sudah disampaikan yang lainnya. Terkait dengan Lumbung Ikan Nasional Pak Menteri, tadi Pak Dullah juga sudah sampaikan. Kita memang tidak bosan-bosannya menyampaikan soal Lumbung Ikan Nasional ini karena ini juga disampaikan Pak Presiden bahwa di tahun 2023 harapannya sudah *on going* dan dia sudah bisa diimplementasikan terintegrasi dengan Ambon *New Port*. Nah hari ini informasi yang kami dapatkan dari 8 orang Anggota DPR mendapatkan informasi dari Menko Marves bahwa lahan yang sekarang yang akan dibangun LIN itu, itu ada ranjau dan ada potensi gunung api. Mohon mohon ada komentar sedikit juga dari Pak Menteri begitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih ya Bu. Nanti pendalaman lebih dalam lagi pada saat Rapat Dengar Pendapat.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya. Terakhir Pak Ketua, terakhir.

Ini usulan rancangan kegiatan prioritas KKP tahun 2023 ini saya mengusulkan *real* ada di sini anggaran untuk Lumbung Ikan Nasional, kalau di 2022 ini tidak ada saya minta di 2023 lah Pak Menteri, itu pertanda bahwa ada *goodwill* bersama kita. Saya minta ini kita konsisten juga Pak Ketua karena rekomendasi ini juga masuk dalam rekomendasi Panja Sarana Prasarana Komisi IV.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke, paham Bu. Jadi Ibu bantu doa aja yang tadi Rp15 triliun dapat.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Aamiin. Aamiin.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya. Kalau dapat selesai lah masalah itu. Kanjeng, silakan Kanjeng.

F-P.GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Teman-teman, Pak Menteri, dan para Pejabat KKP yang saya hormati.

Saya singkat-singkat aja Pak karena saya termasuk orang yang duduk di sini jarang bicara itu takut di *stop* aja, bolak-balik di *stop* kan *nggak* enak gitu.

Jadi begini Pak Menteri, menindaklanjuti kunker ke Riau ya ini saya tadi sudah dijelaskan tapi saya merekomendasikan.

Pertama mengenai masalah eselon Pak, ini saya udah tiga Sekjen lho Pak Antam ya dari periode yang lalu. Ini sangat naif sekali seorang yang menguasai Provinsi Riau, laut, luas, Eselonnya IV Pak, termasuk Kalimantan Barat 3 Provinsi Eselon IV. Bahkan saya bingung Pak Antam kalau empat balok di sini itu pangkat apa? Kapten *nggak* Mayor *nggak* kan, ini ini saya bingung. Sedang contoh aja di Kehutanan Pak karena saya pernah di sana, hanya ngurusi Gajah, Harimau aja Eselon II Pak di Riau. Ini Tolong Pak ya, kalau Bapak seperti ini nanti Bapak nambah anggaran Rp15 triliun akan *disclaimer* lagi Pak karena Eselon II Eselon I akan sibuk ngurus anggaran di Jakarta. Tolong disiapkan strukturnya segera, *copy paste* aja di kehutanan Pak itu, ngurusi Gajah sama Harimau Eselon II, ini ngurusi semuanya di Riau Ikan, perbatasan dan semuanya masih Eselon IV ya. Dan ini saya udah yang ketiga kali bicara ini Pak dari periode Menteri yang lalu, tolong inilah seolah-

olah saya dikira *nggak* mengusulkan ya. Ini kalau Bapak nanti Rp15 triliun Eselonnya seperti ini, *disclaimer* lagi Pak. Dulu di atas Rp12 triliun waktu periode yang lalu Pak, tapi dikembalikan karena *nggak* bisa nyerap. Tolong Eselon ini mumpung tahun ini bisa digarap kita sarankan segera diperbaiki sehingga Rp15 triliun tidak *disclaimer* lagi.

Yang kedua usul di Riau Pak, untuk mendeteksi virus itu alatnya sudah kadaluwarsa Pak tolong belikan yang baru lah ya, kemarin ada yang ...(suara tidak jelas). Jadi untuk virus minta antigen itu bukan antigen kayak kita seperti ini, itu makan waktu satu hari lah ikan kan bisa mati Pak, coba yang bisa berapa menit gitu harganya *nggak* mahal ini mungkin tolong Dirjen yang mana dianggarkan prioritas lah ini ya.

Yang ketiga ini dari Dapil Pak. Ini *Shrimp Estate* kapan di mulai Pak? Bapak sudah ke sana, Eselon I sudah ke sana. Anggota DPR RI baru pertama Pak 18 orang ke Kebumen Pak belum pernah kejadian ini Pak Mindo cs ini ya 18 orang Pak ke sana, ini tolong. Saya ditanya kalau kapan mulai Pak? ya nanti dulu saya tanya gitu.

Terus tadi juga teman-teman menanyakan soal kapal Pak. Di Kebumen itu kan ombaknya besar Pak, tolong jangan yang 5GT lah 1GT lah dan mesinnya orang-orang sana pun jangan di luar Yamaha Pak, Yamaha itu di gas langsung loncat di laut Pak, tapi kalau yang lain itu waduh bisa tenggelam gitu. Ini sederhana, tapi jadi saya tahu saya gitu.

Yang terakhir Pak Ketua, ini soal Undang-Undang 5/90 Konservasi Pak Sekjen. Komisi IV telah mengajukan Undang-Undang 5 Konservasi ya untuk darat dan laut tahun 90, ini waktu itu belum ada Kementerian KKP Pak. Nah sekarang sudah Kementerian KKP dan ini sudah di Baleg Pak, tolong tim Bapak koordinasi dengan KLHK karena saya merekomendasi teman-teman Komisi IV itu *vocal point* mengenai masalah-masalah Satwa yang dilindungi termasuk laut masih di kehutanan. Jadi saya merekomendasi agar kuotanya tetap di Kehutanan, izinnya di KKP. Tapi ini Kehutanan nampaknya masih keberatan Pak, jadi kalau saya nyerang terus seolah-olah saya *nggak* pro Kehutanan gitu. Tapi komunikasikanlah kuotanya di sana ya kan karena saya ...(suara tidak jelas) tes masih di sana Pak, tapi izinnya semua, misalkan Arwana 1 tahun misalkan 1000 10000 ekor silakan Bapak mengeluarkan izin, tapi kuotanya dari sana tahu mana untuk kelestariannya gitu.

Karena itu Ketua. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Darori.

Selanjutnya Pak Hermanto, silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Ini dari Mentawai Pak, agak lama dikit. Pulau, jauh sana perbatasan dengan Afrika.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Komisi, Anggota Komisi, Menteri bersama jajarannya.

Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian karena dalam catatan yang sudah disampaikan itu telah mengartikulasikannya hasil-hasil kunjungan kerja reses Komisi IV ini dalam bentuk tindak lanjut, ini sudah diserap tentunya ini kami memberi apresiasi. Namun demikian kami minta juga supaya ada penguatan di dalam pelaksanaannya agar memiliki dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan nelayan, masyarakat, dan secara umum.

Kemudian dari berbagai tindak lanjut ini saya hanya mengingatkan saja bahwa kita pernah kunjungan kerja ke Singkarak, Komisi IV waktu itu juga di apa didampingi oleh Dirjen Tangkap, di situ ada usulan yaitu Bilih Center yakni Bilih Center artinya pusat pengembangan bilih ikan bilih di sana, di Danau Singkarak. Nah saya minta ini pun juga harus segera direalisasikan karena ini juga merupakan komitmen dari Dirjen pada saat itu disaksikan oleh para nelayan dan juga Anggota yang berkunjung pada saat itu. Saya sampai saat ini belum menerima progres perkembangannya seperti apa begitu.

Kemudian yang kedua, saya juga mengapresiasi langkah-langkah Kementerian terkait mengantisipasi stok ikan menjelang Ramadhan, pada saat Ramadhan dan juga *pasca* Lebaran, Lebaran dan *pasca* Lebaran. Dengan berbagai macam prediksi terhadap kendala nelayan tidak melaut dan lain sebagainya, nah tentunya ini kami minta supaya dengan siklus yang sudah disajikan ini Kementerian yang terkait untuk terkait dengan stok ikan ini supaya diupayakan betul-betul konsisten untuk memenuhi kebutuhan permintaan yang meningkat pada saat menjelang Ramadhan, saat Ramadhan, dan menjelang Lebaran. Tentunya ini perlu langkah-langkah konkret, kami tinggal menunggu.

Kemudian yang ketiga di dalam Dharmasraya itu ada *broodstock*, saya bulan yang lalu berkunjung ke sana itu ada aspirasi bahwa di situ ada 30 hektar lahan itu sudah dinyatakan milik KKP dan itu pekerjaan bangunannya sampai sekarang masih terbengkalai atau kata Mbak Kiki tadi mangkrak. Padahal itu sangat kita butuhkan karena itu adalah pusatnya Sumatera ya pusatnya Sumatera itu *nggak* ada laut ya sehingga kita butuhkan *broodstock* itu untuk pengadaan ikan sehingga nanti untuk masyarakat di daerah Tengah Sumatera itu bisa terpenuhi melalui pengadaan ikan, budidaya ikan. Nah ini kami minta supaya aspirasi dari pengelola di sana dalam hal ini juga aparat di sana supaya pengadaan untuk *broodstock* itu segala perangkat instrumen dan alatnya itu minta dipenuhi termasuk juga SDM-nya ya, nah ini saya minta ini ada perkembangan lah ya. Kemarin pun juga kami mengunjungi ke situ

masih ada juga pegawai yang apa petugas yang honor ya yang honor, nah ini supaya minta ini bisa dipenuhi.

Kemudian terkait dengan soal yang keempat, yaitu bantuan alat pengolah pakan ikan. Nah ini kalau kita ingin membantu nelayan atau budidaya ikan ini harus jelas manfaatnya kepada pengelola ikan, supaya mereka tidak dirugikan karena alat atau mesin pengolah pakan ikan itu yang disalurkan itu adalah pakan tenggelam, masyarakat inginnya pakan apung. Nah ini perlu perlu di inikan ya kan, supaya..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Hermanto masih lama?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Tadi yang lain-lain nambah 2 menit 3 menit itu Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya jangan dong, ini kan tadi udah kita komitmen waktunya cuma 2,5 jam itu perintahnya Pimpinan. Jadi begini aja, *to the point*. Jadi nanti mengusulkannya ditulis, tidak semua mau bantuan itu mesin pakan apung, ada juga yang tenggelam. Jadi Anggota dalam meminta aspirasinya cantumkan ingin mesin pakan apung, itu ya kan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Sudah ditulis Pak Ketua, tapi yang *nyampe* tenggelam juga.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nanti tolong diperhatikan Dirjen Budidaya ya, jangan nanti tahu-tahu *nggak* dicantumkan ngomong cantumkan dan sebaliknya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Terakhir Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Ini juga aspirasi dari kunjungan Komisi IV di Kota Pariaman, ini kampungnya Mbak Kiki ini sebenarnya. Saya hanya menyampaikan aja, jadi mohon apa yang menjadi proposal dari Pemkot dan juga masyarakat itu mohon segera direalisasikan.

Itu saja Pak Ketua, tidak panjang.

*Kalau ada sumur diladang,
Jangan disimpan di dalam peti,
Kalau ada umur panjang,
Jangan di lapor ke Polisi.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Berikutnya. Mana nih, oh ada di sana, *nggak* biasa aja Bu Luluk duduk di situ tuh. Ibu Luluk. Berapa 1 menit ya? Ibu, terima kasih. Silakan.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

5 detik. Ya, terima kasih Pimpinan. Seneng saya dicari-cari.

Pak Menteri, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati.

Saya mudah-mudahan tidak mengulang yang sudah disampaikan oleh teman-teman, hanya saja memang mungkin suatu saat kita juga kepengen dengarlah kabar dari Pak Menteri terkait dengan isu-isu besar di luar yang mungkin biasanya dipaparkan di Komisi IV. Termasuk juga peran KKP dalam presidensi Indonesia juga yang terkait dengan kesiapan Indonesia untuk bisa menghadirkan *Blue Economic* ya karena itu digawangi oleh Menteri Kelautan. Sebagaimana mungkin yang dulu pernah kita sampaikan juga bahwa persoalan sampah laut itu luar biasa, bukan hanya industri tapi juga pertambangan, tapi sayang sekali Pak Menteri ini jarang sekali mengulik soal ini gitu, kenapa? Kan itu temannya juga ada Menteri yang lain. Nah ini kan padahal kalau Perikanan kita atau perairan kita dalam kondisi yang rusak ekosistem dan habitatnya akibat entah itu Industri atau Pertambangan yang mati itu para nelayan kita Pak, jadi ini mohon atensi kita yang sangat besar.

Yang kedua yang terkait dengan Pengelolaan Ruang Laut. Kalau tidak salah waktu kita kunjungan ke Bali, Ibu Nina ya atau siapa yang menjelaskan ke kita bahwa ada ancaman yang terkait dengan rencana pembangunan jaringan di bawah laut yang akan melintasi wilayah kita karena itu bukan punya kita, jadi Singapura dan negara Australia. Dan ini juga ternyata belum Bapak sampaikan ke Komisi IV, sehingga kita bisa punya sikap yang lebih jelas untuk bisa mempertahankan daulat laut kita dan sekaligus juga hal-hal yang lain yang ada di dalamnya.

Kemudian yang terkait dengan apa namanya perburuan Hiu Pak. Ini Pak Menteri mohon maaf juga jarang sekali menyebutkan, ternyata Indonesia itu dicatat oleh organisasi internasional sebagai eksportir Sirip Hiu terbesar dan ini memalukan sekali Pak. Padahal perburuan Hiu itu pertama udah dilarang dalam berbagai apa semacam kesepakatan ya internasional, tetapi Indonesia dianggap sama sekali tidak tegas. Nah saya juga pengen tahu apakah kita punya aturan yang mengatur tentang perburuan Sirip Ikan Hiu, kok kemudian malah kita menjadi negara eksportir terbesar yang ada di Indonesia.

Nah yang kemudian yang terkait dengan soal ini Pak Kampung Nelayan Maju, ini memang agak berita dari Dapil agak melompat jauh ya. Di

Wonogiri itu sudah beberapa kali di survey oleh KKP bahkan dari tahun yang kemarin 2021, tapi sampai sekarang realisasinya ada dua Desa di Kecamatan Eromoko di sana itu yang juga belum realisasi. Mohon ini Wonogiri sudah terisolasi, tapi kemudian malah *nggak* kesentuh sama sekali dari program KKP yang kasihan.

Yang berikutnya juga di sana saya tidak mengulang tapi mendukung yang disampaikan oleh Pak Edward ya bahwa bantuan GT5 itu saya kira memang tidak *fair* dan tidak adil kalau, pertama itu hanya untuk beberapa Anggota dan yang kedua itu ternyata malah tidak dibutuhkan. Jadi kalau memang itu kapal ketinting mohon sekali ini bisa, kalau memang oke dan di dan diperbolehkan maka kita segera mengajukan itu Pak karena memang tempo hari saya juga ketemu dengan hampir 800 nelayan yang ada di Wonogiri dan semuanya itu membutuhkan bantuan kapal jenis ketinting ini.

Nah saya kira yang menarik ini bahwa ternyata saya menemukan ada nelayan milenial, jadi sekarang ada nelayan muda yang semula dari hobi memancing di laut Wonogiri. Mungkin Pak Menteri *nggak* kebayang bahwa peta Wonogiri itu punya laut karena ini masuk di Samudera Hindia Selatan ya, tetapi kemudian anak-anak ini berpikir kalau regenerasi nelayan ini tidak didukung dari semenjak sekarang dan mereka justru mau beralih ke pembudidaya lobster yang semula mancing, padahal mancing itu kalau *nggak* salah udah ada lebih dari 8 orang Pak yang mati karena jatuh dari tebing karena mereka masih menggunakan tradisional.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mbak Luluk tolong apa yang kita agendakan itu yang dibahas, tolong jangan melenceng-melenceng. Ya, 1 menit lagi.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Iya, tidak kemana-mana Pak. Tetapi ini terakhir iya, *nggak* sampai 1 menit Ketua. Jadi terima kasih itu atensinya Pak Menteri.

Terima kasih dan salam hormat, salam dari teman-teman nelayan di ... (suara tidak jelas) karena tim dari KKP udah turun.

*Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Iya, makanya tadi Ketua tadi saya cari di sana.

Selanjutnya Yessy, silakan.

F-P.NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Terima kasih.

Ketua dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri KKP beserta Sekjen dan jajaran Eselon I yang saya hormati.

Langsung saja. Yang pertama saya hanya mau mengingatkan bahwa setiap kali RDP ataupun Raker saya selalu menekankan bahwa stok ikan kita, sumber ikan kita habitatnya bukan hanya di laut tapi di perairan umum darat juga tidak kalah penting, itu yang selalu saya suarakan ketika rapat. Dan hari ini saya hanya mau menuntut dan menggarisbawahi komitmen dan konsistensi dari KKP terhadap perairan umum darat.

Yang pertama saya mengulas sedikit terkait bantuan-bantuan di DJPB ini Pak TB. Ada benih ikan, ada pakan, kemudian ada bantuan ikan hias, dan masih ada beberapa lagi program ini di tahun 2020 dan 2021 tidak terakomodir, alasannya karena keterbatasan anggaran. Itu yang pertama yang ingin saya tanyakan karena di Dapil saya ini tidak ada sama sekali dan bantuan pakan juga dari 2020-2021 tidak ada bisa kita realisasikan.

Kemudian di Dirjen Perikanan Tangkap Pak Zaini, saya menanyakan di RDP lalu kapal bantuan 5GT untuk setiap Anggota yang dapat satu, bisa tidak dialihkan dengan bantuan-bantuan yang sifatnya lebih kecil, situasional, dan adaptif dengan kebutuhan di Dapil masing-masing karena tidak semua Anggota di sini ini punya laut. Dapil saya tidak bersinggungan dengan laut sama sekali, tapi kalau ini dipaksakan harus masuk dan diterima di Dapil tentu tidak bisa. Sayang anggarannya Rp500 juta, tapi kalau bisa dibedah dibagi dengan bantuan yang kecil misalnya ketinting, pukot, jala, dan lain-lain saya pikir ribuan rumah nelayan tradisional nelayan-nelayan kecil itu bisa menikmati itu. Karena kalau melihat dari Kementan kemarin ada salah satu Alsintan yang cukup besar, tapi tidak relevan di Dapil ini bisa diganti dengan Alsintan yang relevan. Sekiranya itu bisa menjadi catatan Pak Dirjen mungkin nanti dengan Pak Menteri bagaimana untuk meningkatkan perairan umum darat.

Kemudian yang terakhir, saya juga mau memberikan gambaran pentingnya sarana dan prasarana untuk perairan umum darat, untuk nelayan-nelayan tradisional tidak melulu berbicara laut. Di Dapil saya di Kabupaten Kapuas Hulu mungkin Pak Sekjen sudah pernah ke sana, itu kalau musim kering ada namanya Danau Sentarum itu sangat terkenal dengan keindahan alamnya, dengan potensi ikan yang ada di situ. Ketika pas kekeringan itu bisa 2.500 ton ikan itu mati cuma-cuma karena tidak ada sarana, tidak ada jalur untuk *stocking* ikannya. Nah ini mohon perhatian ke depan dari KKP kami sangat mengerti dan kami memahami bahwa anggarannya sangat-sangat sedikit sangat kecil harus berbagi seluruh Indonesia, tapi komitmen dan program yang sekiranya tepat sasaran di Dapil bisa diprioritaskan. Kita tidak menuntut yang lebih-lebih lebih dari anggaran yang kita punya, tapi yang sudah ada dijalankan dan dipetakan dengan kebutuhan Dapil masing-masing.

Mungkin itu saja Ketua saran dan masukan dari saya sebagai salah satu Dapil yang tidak bersinggungan langsung dengan laut.

Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Terima kasih Yessy.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin Pimpinan 5 detik saja.

Terkait BLU. Dulu lupa karena dulu saya pesan juga BLU untuk dihadirkan, mohon maaf. Ternyata untuk pinjaman nelayan yang masih di bawah Rp50 juta *nggak* di bawah Rp50 juta bahkan Rp25 juta aja harus setor BPKB Ketua, gitu aja. Jadi mohon atensinya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mbak Luluk, tadi Mbak Luluk datangnya kesiangan. Ini pejabatnya baru dilantik. Nanti waktu RDP, BLU-nya atau KUR-nya akan dijelaskan secara secara jelas ya. Makanya kalau datang kalau bisa *on time*.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Oke. Selanjutnya Alien Mus. Silakan, 1 menit.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan. Baru *Assalamu'alaikum* udah 1 menit kita.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati kolaborasi Ketua luar biasa PDIP, Nasdem Pimpinan yang *best*,

Bapak Ibu Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bapak Menteri KKP yang luar biasa senyumnya bisa membawa kedamaian,
Bapak Sekjen beserta Eselon I yang luar biasa dan

Oh itu sahabat saya yang foto saya Berdua dan Komisi IV tahu bahwa saya dan Pak Zaini sungguh sangat dekat.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

3 menit, 3 menit.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Kiki.

Pak Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang baru saja dilantik, karena ini dalam satu agenda ada isu aktual termasuk penata ruang laut, mohon maaf Pak Menteri sesuai dengan. Oh ya, terima kasih Pak Menteri

kemarin sudah ke Maluku walaupun hanya beberapa waktu dan sungguh sangat disayangkan karena kita berharapnya lebih lama karena banyak masalah, tapi sudah disampaikan beberapa dari Maluku masalahnya sih hampir-hampir mirip sama. Karena ini kita harus lihat Bapak Victor bahwa PRL ini sangat penting penataan rumpon di laut di perairan laut, ini menjadi tugas Bapak dan *Insy Allah* Bapak menjadi Dirjen PRL ini bisa membantu masyarakat khususnya untuk nelayan dalam penataan rumpon juga yang juga bisa merugikan kita.

Kemudian karena kita masuk dalam agenda yang harus sesuai dengan apa yang diagendakan. Kemarin kami Komisi IV reses di Sulawesi Selatan Pak Menteri dan ternyata ada beberapa masalah yang kita temukan khususnya di bidang pertanian eh pertanian, perikanan, itu ada di Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar Pak Menteri, di sana belum ada kejelasan tentang kelembagaan UPT Pelabuhan yang ada di Untia. Mohon ini dipercepat dan mohon ini segera diselesaikan, karena kemarin Pak Zaini waktu kita reses *nggak* datang, jadi ini kita sampaikan.

Terus di sana juga meminta untuk pembangunan *breakwater* Pak Menteri di Pelabuhan Untia itu, termasuk juga instalasi air bersih dan juga penambahan SDM. Ada beberapa pesan nanti saya sampaikan secara tertulis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ada perwakilan juga dari DPR Provinsi Sulawesi Selatan yang kemarin ikut serta untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, itu ada beberapa adalah asuransi nelayan itu sangat penting. Saya berharap kemarin yang sudah disampaikan tahun 2020 yang sudah dipotong asuransi nelayannya di 2021 bisa dialokasikan kembali berdasarkan dengan wilayah-wilayah potensi nelayan yang banyak.

Kemudian BBM memang masih sangat sulit Pak Menteri untuk subsidi juga para nelayan yang 30GT ke bawah dan juga untuk 30GT ke atas walaupun ini SPBU-nya juga susah. Di Provinsi Sulawesi Selatan memang wilayahnya sangat besar butuh sekali *Cold Storage* kalau bisa *Cold Storage portable*, karena memang antara satu daerah ke daerah lainnya memang membutuhkan alokasi ikan Pak Menteri walaupun stoknya saya lihat di laporan Pak Menteri di sini Sulawesi Selatan ada tapi untuk memberikan alokasinya ke daerah-daerah itu ternyata butuh *Cold Storage portable*. Tolong ini juga menjadi acuan di konsentrasi tahun 2023, kalau memang 2022 itu ada tolong juga dialokasikan di Sulawesi Selatan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Masih banyak Alien?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Satu lagi Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Itu tadi baru Sulawesi Selatan ya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Bukan. Ini hasil reses kan Ketua, sesuai agenda kan? Sesuai agenda, tidak di luar dari agenda. Belum ini, RDP aja baru kita bahas kebutuhan kita sendiri.

Kemudian Ketua, izin saya ingin menyampaikan tadi sudah di singgung oleh Pak Darori tentang Undang-Undang 5/90 Pak Menteri. Komisi IV sangat komitmen dengan KKP, mohon ini setiap sekali Raker dan RDP saya selalu ingatkan *lobbying* dari KKP dengan Kementerian LHK tolong diperkuat kembali agar menjadi atensi laut, air laut, air tawar, atau air apapun itu masuk dalam kategori pertanggungjawaban di KKP. Mengingat Pak Menteri sudah berbicara tentang *Blue Economy*, tapi juga melihat kalau berbicara KKP bukan hanya ada di laut, ada di darat, air darat ini juga ketersinggungan sekali. Terus Pak Menteri ini masalahnya adalah tentang *export Coral*. Kalau seandainya ini ada di dua Lembaga Kementerian KLHK dan KKP, sebenarnya yang bertanggung jawab tentang *illegal export Coral* itu ada di mana? ini yang menjadi masalah. Tolong juga ini bisa menjadi tugas Pak Victor nih karena PRL juga di situ masuk. Mohon ini kita tegaskan kembali Pak Menteri.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup Bu Alien?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Satu lagi. Untuk tambang di sekitar perairan Pak Menteri, tolong juga ini di atensikan ya misalkan ada migas yang ada di perairan laut itu bagaimana. Jadi mohon tolong ditegaskan karena di Perairan Maluku Utara ada lagi yang mau masuk karena ada temuannya hasil gas bumi yang ada di laut besar sekali, itu ada kerja sama dengan Jerman apakah itu sudah diketahui oleh Pak Menteri atau belum tapi ini juga menjadi kendala nanti di perairan laut di daerah kami.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam.

Demikian pertanyaan dan tanggapan disampaikan oleh Anggota Komisi IV. Saya persilakan Saudara Menteri untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Anggota.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV.

Yang pertama atas atensi yang diberikan. Yang kedua seluruh masukan akan menjadi catatan kami dan beberapa pertanyaan penting tadi saya lihat mohon izin nanti akan saya jawab melalui laporan tertulis biar lebih komprehensif.

Tapi ada beberapa hal yang saya kira soal Lumbung Ikan Nasional ini akan menjadi pertanyaan terus-menerus saya kira. Pak Abdullah dan Ibu Sa'adiyah, konsep penangkapan ikan terukur itu sebetulnya jawaban dari semua karena kalau kita bicara soal Lumbung Ikan Nasional Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional sebetulnya kan kalau kita mengacu kepada data *Scientist* yang dikeluarkan oleh Komnas Kajiskan itu kan ada 12 juta. Dulu 12 juta 500 kemudian sekarang yang terbaru adalah 12 juta, dari 12 juta itu ada di setiap WPP. Nah yang paling besar itu ada di WPP 715, 714, dan 718 itu kira-kira sekitar 3 jutaan ton menurut data Kajiskan, walaupun kalau mau jujur ini mohon maaf apakah 3 juta Ton itu benar? karena dasarnya kan kalau secara keilmuan itu kan dari *log book* iya kan, tetapi dapat juga ditemukan bahwa satu izin kan bisa digunakan lebih dari satu kapal misalnya begitu.

Saya sih tidak *prejudice*, tapi saya jawab dengan penangkapan terukur itu adalah ada *monitoring* teknologi yang bisa melihat secara langsung. Jadi setiap kapal apapun kapalnya, apakah itu kapal transportasi, apakah itu syukur kapal ikan dan lain sebagainya mereka harus *teregistered* dengan dengan satelit itu, jadi mereka terkoneksi *sorry* terkoneksi dengan satelit. Dengan sistem ini maka kita akan bisa menentukan bahwa posisi atau stok perikanan kita itu sebenarnya berapa sebenarnya. Nah ini kapan bisa diketahui? ketika implementasi dari kebijakan penangkapan terukur ini bisa direalisasikan. Ini semua Ibu, Bapak, sebetulnya jawaban. Jadi artinya begini, untuk penangkapan terukur ini kita sedang ajukan RPP, jadi bukan bukan Perpres tadi seperti LIN gitu. Kalau LIN kan cuman satu saja ya Ibu Bapak, tapi kalau penangkapan terukur menyeluruh, mulai dari Sabang sampai ke Merauke kita zonasi.

Lalu kemudian yang kedua kalau itu misalnya sudah bisa kita lakukan, yang kedua hak-hak daripada nelayan di setiap WPP itu kita datang jumlahnya itu ada 2,2 jutaan nelayan, 2,2 juta nelayan berdasarkan apa namanya berdasarkan *by name by address*. Nah ini kita bisa identifikasi jadi secara jelas nanti, jadi contohnya misalnya di 718 itu jumlah nelayan aslinya berapa sih yang ada di situ, lalu yang ngambil di dalamnya itu berapa? Nah ini bisa kita deteksi. Mereka punya hak langsung bahwasanya kemudian, jadi salah satu rumusan yang kami minta kepada Dirjen Tangkap untuk dibuat rumusan yang itu sedang kita proses dan kita ajukan untuk sementara kita jalankan kita gunakan Permen yang cantolannya ke PP 85 ya selama proses PP RPP sendiri ini yang sedang kita ajukan karena RPP sendiri tidak pernah cepat, lama ini bisa jadi. Mudah-mudahan sih harapan kami sebetulnya April Mei ini sudah bisa selesai atau sebetulnya beberapa bulan yang lalu, tapi faktanya memang tidak bisa cepat.

Nah Permen sendiri untuk implementasi dari penangkapan terukur sebagai satu perantara dari antara saja itu juga belum selesai sekarang sedang harmonisasi, jadi kita belum bisa jalankan. Dalam *current condition* itu masih biasa, *current condition* satelitnya belum bisa kita karena di situ ada

syarat begitu dia mengajukan contoh misalnya 718 Ibu. 20% 718 itu sama dengan 1.000.700 ton menurut Kajiskan, 20%-nya itu menjadi haknya nelayan tradisional atau nelayan lokal *by name by address* tadi yang tidak boleh dipungut PNBPN itu menjadi hak mereka di setiap zona, ini keadilan ini. Yang kedua sisanya itu industri kita undang, untuk apa? dia harus ngambil di situ dan tidak boleh digeser ke mana-mana dia harus didaratkan di wilayah situ dan diproses di situ. Jujur saja termasuk salah satunya kita minta ABK atau seluruh tenaga kerjanya harus direkrut dari lokal, walaupun ini juga kendala dalam dalam faktanya tidak mudah juga kita mencari tenaga kerja di lokasi tersebut gitu, tapi paling tidak itu keberpihakannya.

Lalu tadi ada Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana kaitannya soal Undang-Undang Cipta Kerja bahwa nelayan ...

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Pak Menteri.

Biar apa ya biar nantinya kita akan sosialisasikan di Maluku. Sekarang Pak Menteri.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Tuasikal. Kalau mau interupsi harus ke meja Pimpinan dulu.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Oke. Siap Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Interupsinya seperti itu ya. Hanya mengingatkan Pak.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Boleh saya lanjutkan Pak Abdullah? Saya lanjutkan, baik.

Jadi dulu pernah kita buat FGD salah satunya kita jelaskan gamblang, nah sekarang ini berproses Pak. Jadi nanti intens sebetulnya, saya memang sudah minta kepada Pak Dirjen Tangkap untuk melakukan sosialisasi ke seluruh provinsi ke zona-zona tadi bahkan provinsi dan kepala daerah tingkat II di pesisir. Ya memang saya juga pengennya cepet Pak, saya pengennya cepet.

Yang kedua daerah pendaratan. Jadi kalau daerah pendaratan sampai hari ini belum diputuskan tepatnya sebetulnya di mana, di mana, di mana. Tapi pasti akan dihitung Bu, jadi kalau misalnya nanti jumlah industri yang masuk itu ada berapa, pasti akan dihitung bahwa pendaratan yang efektif di daerah mana. Lalu kemudian nelayan tradisional itu diberikan kebebasan untuk mendarat, lebih bagus memang mendarat di industri supaya ikannya langsung dibeli, tapi kalau mereka mau mendarat di pelabuhan-pelabuhan

daerah pun diperbolehkan juga begitu. Jadi memang ini sedang sedang dalam proses terus bekerja setiap hari, lalu kemudian Permennya juga belum turun masih harmonisasi bahkan kita bukan hanya lobi kita lobi semua ke seluruh lembaga Kementerian yang menurut kami bahkan kepada Presiden sudah kami sampaikan juga.

Jadi LIN itu akan terjawab dengan kebijakan penangkapan terukur karena demokrasi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi betul-betul di zona itu. Jadi nanti di situ itu ada berapa provinsi tuh, ada Provinsi Papua, ada Provinsi Provinsi Papua Barat, ada Provinsi Maluku, ada Provinsi Maluku Utara, lalu ada sebagian dari Sulawesi Tenggara juga dapat Bu itu mereka punya hak juga atas lautnya itu itu yang kita sebut dengan zona 3 dan angkanya kalau secara menyeluruh itu dari 714, 715, 718 itu 2,7 juta ton kajian Komnas Kajiskan. Di situ bisa terambil 1,5 juta saja dengan *selected fish* atau artinya yang dan pengambilannya juga industri ini contoh ada satu perusahaan dari Amerika yang berminat, dia bilang, "sekarang ini saya mau berminat karena kebijakannya sudah jelas". Yang menjadi pertanyaan berikut, "ikan kecil bagaimana? ikan kecil boleh diambil atau tidak? kalau ikan kecil boleh diambil, saya tidak jadi masuk." Loh ini yang saya bilang industri beradab, kenapa begitu? ikan kecil dia bilang harus tidak boleh diambil. Saya bilang ada Permennya, nah karena apa? Karena tahun depan kalau saya mau ngambil ikan itu sudah besar. Ini ini yang bagian dari implementasi *blue economy* itu salah satunya adalah bagaimana populasi ikan itu bisa terjaga dengan baik supaya generasi-generasi mendatang itu bisa masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tumbuhnya keberadaan ikan itu sendiri.

Kalau seperti sekarang mohon maaf, Pantai Utara Jawa ini rasanya udah kering nih ikannya udah habis gitu, karena sulit sekali. Contoh misalnya mohon maaf nih misalnya oh ini ikan anu kapal cantrang ini tolong dong diizinkan, sudah jelas-jelas itu apa namanya merusak lingkungan, gimana ya cara menjelaskannya. Kalau dilarang ya yang telpon saya banyak sekali minta tolong lah ini tolong dikasih kesempatan mau lebaran segala macam dan seterusnya itu contoh gitu, nah ini ini soal lingkungan nanti. Terus belum lagi nanti konflik horizontal di wilayah-wilayah lain mereka juga *nggak* bisa terima, ini apa namanya memang pekerjaan kita ke depan.

Jadi Ibu Saadiah.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Pak Ketua, saya interupsi sebentar Pak Ketua. Mohon izin.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau bisa nanti Bu, biar selesai dulu baru Ibu ngomong.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Nggak, biar dia *nggak* terputus Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini kan bukan hanya pertanyaan dari Ambon loh, ini masih banyak pertanyaan dari seluruh Anggota. Jadi maunya saya semua Anggota dijawab nanti Ibu boleh punya waktu untuk memperdalam sedikit ya karena waktunya juga kita kan sampai 13.30 WIB sekarang sudah mau hampir jam 13.00 WIB ya. Silakan Pak Menteri.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Pak Ketua saya cuma ini sedikit aja biar kita *nggak* *nggak* terpengaruh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bu, yang ngatur rapat saya Bu. Saya minta tolong kita kerja sama yang baik. Biar dijelaskan dulu semuanya ya Pak Abdullah Tuasikal juga nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya, supaya benar-benar paham ya.

Silakan Menteri.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kami lanjutkan kembali bahwa LIN itu sebetulnya terangkum di dalam ini yang soal bahasa, jadi terangkum di dalam kebijakan penangkapan terukur yang sekarang ini sedang dalam proses ada dua tahap. Yang pertama adalah Peraturan Menteri dulu yang kita terkait dengan PP 85 yang sekarang sedang harmonisasi belum selesai, tapi paralel dengan itu dipersiapkan RPP-nya. Jadi kalau dulu LIN itu dibuat Perpres R-Perpres katakan begitu sekarang ini RPP jadi lebih kuat lagi harapannya begitu.

Lalu terus kemudian soal.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Makanya saya interupsi dulu Pak Ketua, biar tidak salah persepsi kita ini.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bu tadi kan sudah saya bilang, biar dijelaskan dulu sampai sudah jelas nanti Ibu juga saya kasih kesempatan ngomong.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Bukan Pak Ketua. Ini soal cara pandang Pak Menteri dengan kami yang memang harus didudukkan Pak Ketua soal LIN ini.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bu, bukan hanya Ibu yang bertanya, semua juga bertanya Pak Menteri belum jawab. Dan nampaknya Pak Menteri sudah menjelaskan hampir 15 menit sampai 20 menit untuk khusus Maluku. Kita kan harus berkeadilan Bu, kita jangan memperpanjang ini. Biar nanti selesai, Ibu boleh bertanya, Pak Abdullah Tuasikal boleh bertanya untuk memperdalam.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Justru ini keadilan Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Lho saya sudah katakan Bu. Beliau ini sudah menjawab 20 menit lho khusus untuk Ibu lho, untuk Pak Abdullah Tuasikal lho yang lain belum dijawab lho. Karena saya bilang tadi, ini lebih penting dahulukan dulu jawabannya ya. Silakan Pak Menteri lanjutkan.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Baik. Nanti Ibu kalau memang *nganu* khusus saja Bu ya khusus saja saya kita diskusi khusus dan kita perjuangkan bersama, pokoknya intinya kebijakannya adalah untuk kepentingan masyarakat di Indonesia Timur.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Pak Ketua.

Saya kira biar lebih lebih jelas karena kalau tidak, secara tertulis itu kita *nggak* mampu jawab untuk masyarakat. Ini soalnya ada ada apa pendapat Pak Menteri ya dengan kita ini agak beda soal Lumbung Ikan Nasional.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Begini Pak Tuasikal. Nanti dia beliau jawab jawab dulu selesai, termasuk pertanyaan Anggota yang lain. Nanti saya berikan Bapak sama Ibu untuk memperdalam, termasuk juga nanti kalau perlu bikin secara resmi apa apa apa ya Pak ya paham ya sebentar ya.

Lanjut Pak Menteri.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Baik, terima kasih.

Yang berikutnya adalah yang menjadi pertanyaan tadi Pimpinan bahwa soal pupuk bersubsidi karena memang baru sekarang ini kita tangani kami sudah membuat surat kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan alokasi anggaran pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan atau udang skala kecil yang suratnya sudah kami sampaikan.

Berikutnya kepada Pak Darori soal *Shrimp Estate*. Sabar Pak, memang kita sedang proses supaya *proper* ya nanti akan berbarengan dan *Insyallah* akan di sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden dan beliau akan melakukan *groundbreaking* di seluruh titik, ada empat titik yang akan dilakukan termasuk di Aceh.

Sementara itu saja Pimpinan, untuk selanjutnya akan kami jawab melalui jawaban tertulis. Demikian terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke. Silakan Bu kalau mau ngomong saya kasih waktu, setelah itu Pak Abdullah Tuasikal silakan. Masing-masing 2 menit.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi Pak Menteri, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi cara pandang soal kebijakan LIN ini berbeda dengan apa yang kami pahami dan yang konsep *grand design* besarnya. Karena LIN bukan bagian dari kebijakan penangkapan terukur Pak, justru kebijakan penangkapan terukur itu harusnya itu bagian dari LIN. Kita bicara LIN itu bicara dari hulu sampai di hilirnya Pak, semuanya dari prosesnya begitu. Jadi tadi kalau misalnya Pak Menteri sampaikan setiap kami tanyakan LIN selalu seakan-akan mohon maaf Pak Menteri jawabannya adalah kebijakan penangkapan terukur, ini perlu kita diskusikan lagi Pak Menteri.

Jadi kita bicara tentang LIN ini merupakan paradigma pengelolaan perikanan terpadu dan berkelanjutan yang mengintegrasikan perikanan tangkap di dalamnya, kemudian juga budidaya ada di dalamnya, pengolahan ada di dalamnya, penguatan daya saingnya juga masuk ke dalamnya, semua ruang laut ada di dalamnya. Begitu kira-kira Pak Menteri yang saya tangkap, jadi mohon agar kita dudukan lagi diskusi kita ini biar dia tidak melenceng sesuai dengan konsep besarnya.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Abdullah Tuasikal, biar nanti sekalian dijawab sama Pak Menteri.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Siap Ketua.

Poinnya saya mengapresiasi program Pak Menteri ya soal penangkapan terukur. Lumbung Ikan Nasional ini Pak Ketua kan sudah kita gariskan dari awal ya itu ada Pelabuhan terpadu, Pelabuhan terpadu supaya

ada kepentingan pengusaha di dalam untuk membangun pelabuhan terpadu itu Pak Menteri. Pak Menteri kan punya jatah di sini ada direncanakan di Tual, Benjina, dan di Ambon, lalu kita tenggelam karena Ambon *New Port*-nya gambut di dalam kita *nggak* tahu Pelabuhan kita di mana. Sekarang dengan Pak Menko, itu katanya ditarik dipisahin di apa dipisahin. Sekarang yang kita mau arahkan itu agak benar Pelabuhan terpadu di mana, industri di mana, keterlibatan pengusaha itu di mana, bukan soal perikanan terukur, perikanan atau soal penangkapan, tapi bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana industri bisa bangun. Kesejahteraan masyarakat otomatis saya apa ...(suara tidak jelas), tapi kita beda Pak Ketua. Dari awal kan Pak Ketua ikut ini, Pak Menteri kan ya bukan kita yang saya kira kan staf-stafnya banyak ya kita harus jelaskan yang benar, bahwa Pelabuhan terpadu ya Lumbung Ikan Nasional awalnya kita udah sepakat lalu masuk udah jelas. Saya harapkan ada peraturan ada Peraturan Presiden dan ini juga sudah di *follow up* dari awal ya dari setelah itu dari Pak Gubernur juga udah masuk Pak Ketua, jadi alasnya udah tepat. Tinggal Pak Menteri ini ada rancangan saya bawa kalau memang tidak dilanjut silakan, tapi minimal ada *action*-nya jangan tiap Menteri tiap Menteri hilang hilang lalu apa. Ini soal Maluku ini Pak Menteri.

Kami Maluku tidak memiliki apa-apa, yang ada itu adalah soal di laut, soal WPP 714, 715, dan 718 kita harapkan Pak Menteri, kita mendukung kita orang orang Maluku mendukung. Tapi yang kita harap Pak, wujudlah yang namanya Pelabuhan terintegrasi, Pelabuhan terpadu untuk kepentingan aktivitas pelabuhan yang ada di sana. Nah kalau Pelabuhan terukur Pak Menteri mau ke mana, ikannya mau dibawa kemana? Pak Menteri harus katakan bahwa harus ikannya harus didaratkan ke sini, harus didaratkan ke sini. Di Maluku sesuai dengan Pak Menteri 400.000 ton ya 400.000 ton ada di Kota Ambon, sekarang Kota Ambon mau di mana kalau hanya perlu terukur-terukur, lalu terukur mau diapain? yang ada kan ada pencurian di mana-mana Pak Menteri ya. Ini kan kita.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup Pak?

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Pak Ketua saya mengharapkan itu komitmen kita awal, komitmen Menko ya tahun 2016 ini kan sudah ada di Sekretariat Negara, ini kan diparaf, ditandatangani, apa *nggak* bisa dipelajari Pak Ketua ya. Jangan dari awal hapus hapus hapus, negara ini mau dibawa ke mana.

Prinsipnya saya mengapresiasi. Saya kira Pak Menteri orang cerdas, saya kira Pak Menteri mau membangun daerah ini, mau membangun negeri ini Indonesia mau di bangun. Tapi kalau Maluku diterlantarkan Pak Ketua, ini yang kami berpikir bahwa di mana itu keadilan?

Ya Pak Ketua, saya kira ini aja. Cuma saya buat catat aja Pak Ketua kita udah pernah Raker dan Raker itu harus menjadi pedoman dan referensi

untuk kita, jangan kita keluar dari itu Ketua. Kalau kita keluar dari itu Ketua, maka setiap Raker itu kita tidak dihargai.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih Pak Abdullah Tuasikal.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Saya kira demikian Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi kalau bicara masalah itu. Ada 1 Kabupaten Tanggamus laut lepas ya *Alhamdulillah* dari saya jadi Anggota DPR sampai hari ini belum ada pembangunan, dari Dirjennya ganti udah puluhan belum ada pembangunan. Dikasih Rp1 miliar *breakwater*, Rp2 miliar *breakwater*, lama-lama saya bilang udah *nggak* usah lah daripada sayanya kecil hati. Nah mungkin kalau Ambon kan beda, penghasil Lumbung Ikan, beda perlakuannya dengan kami yang di Lampung dan saya *nggak* pernah bicara lagi masalah Pelabuhan Tanggamus, *nggak* pernah saya bicara ya.

Nanti Pak Menteri silakan jawab. Setelah itu kita ambil kesimpulan rapat ya. Silakan Pak Menteri.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Izin Ketua. Apa bisa 1 menit, supaya berkeadilan dari Timur langsung ke Barat.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nggak, anda bacain Alien punya atau anda punya pendapat sendiri?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Hapal sendiri Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke, *ngomong*. Silakan 1 menit.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Izin Pak Menteri.

Maksud saya begini Pimpinan, masalah yang saya pertanyakan pengerukan di pelabuhan perikanan Aceh tadi ada sedikit respon dari Pak Menteri supaya kita juga *nggak* mau seperti kawan-kawan kita di Ambon agak dikucilkan, kita juga di Barat juga *nggak* mau dikucilkan Pak Ketua. Kalau memang tidak memungkinkan Pak Menteri, jawab saja tidak mungkin. Kalau

memang memungkinkan supaya namanya kami ini memohon, setiap orang memohon tangan di bawah Pak, kalau tangan di atas ke diskotik namanya Pak.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi Pak Menteri, ada dua pertanyaan dari Ambon, satu pertanyaan pendalaman dari Aceh. Tolong dijawab ya.

Terima kasih.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Baik. Terima kasih Pimpinan.

Ini menjadi menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita memahami Bu Saadiah dan Pak Abdullah ya. Jadi begini Pak, Lumbung Ikan Nasional jelas bahwa itu untuk 3 WPP tadi. Intinya saya mau tanya Pak, apakah benar bahwa itu harus *integrated* hulu hilir? Jadi saya bilang penangkapan terukur itu bukan soal tangkap Pak, tapi mohon maaf bangun *integrated port*, ini direkam soalnya, duitnya itu *nggak* ada masalahnya. Cuma satu yang harus saya lakukan, saya undang investor. Investor, ini lho saya kasih hak kamu untuk ngambil di sini, tapi syaratnya kamu harus bangun Pelabuhan. Sudah ada 8 Pelabuhan yang dibangun Pemerintah, silakan dipilih atau kalian mau bangun baru, itu salah satu yang itu yang salah satu yang sedang kita kerjakan, gitu supaya terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir.

Kalau misalnya kita siapkan, contohnya misalnya waktu itu *New Port* lalu kemudian tidak jadi karena memang anggarannya tidak ada Pak, yang pertama. Yang kedua, siapa yang mau masuk ke situ kan juga harus kita undang. Siapa pun mau masuk ke dalam kawasan itu kan harus kita undang, apakah cocok atautukah pas dan lain sebagainya sesuai investasi begitu kira-kira.

Jadi saya kira saya kepengen ada diskusi secara khusus lah supaya kita sama Pak, kita supaya kita sama, jadi apa yang bahasanya gitu bisa sama gitu. Kalau mau begitu, saya sangat bersedia Ibu sama Bapak saya undang khusus mari kita duduk betul-betul kita persepsinya supaya sama apa yang langkah yang kita laksanakan dan saya paham persis di mana kendalanya yang terjadi gitu. Itu saja.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Interupsi lagi Pak Ketua.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Sebentar saya saya jawab dulu ke Pak Fakhry.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan. Pimpinan. Izin Pimpinan. Kakak diam dulu kakak.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Sebentar untuk yang ini Pak Ketua.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Abis itu baru kakak masuk. Kakak Saadiah.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Ini tidak boleh begini ya. Tidak boleh ada alasan, tidak boleh ada alasan tidak ada duit, tidak ada uang. Ini soal janji Presiden yang ke sana wara-wiri ke sana dengan beberapa Menteri ke sana saya tidak bisa ambil terima kayak begini. Presiden menyampaikan sejak 2016 akan dibangun *groundbreaking*-nya bulan November 2017, kalau katakan duit, tidak ada kami tidak bisa terima. Bisa bangun Kereta Api di Bandung, bisa bangun Ibu Kota Negara, nah ini laut kami bertahun-tahun 3 WPP ada di sana. Kontribusi tertinggi 37% untuk negara ini, kalau alasan tidak ada uang. Bagi kami ini tidak adil. Kami ini ya Maluku itu tuh orang yang paling baik se Indonesia ini, tidak pernah bilang mau kibarkan bendera, tidak pernah bilang mau Merdeka.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya sudah cukup Bu, cukup.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Kalau bilang hari ini tidak ada uang, waduh mana Presiden itu? Mana Menteri Marves itu?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya sudah Bu cukup, cukup, cukup, cukup.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Benar-benar kami di tipu ini pembohongan ini, saya tidak bisa terima di sini. Kami ini Pak Ketua, kami di kata-katai. Enak saja bilang tidak ada uang, kami tidak bisa terima model kayak begini.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bu. Oke udah cukup, cukup.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Pak Menteri saya mohon nanti di anggaran KKP nanti harus ada Lumbung Ikan Nasional.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup, cukup.

Coba tadi Pak Menteri jawab dulu pertanyaannya si Salim supaya adil. Jawab, ini pertanyaannya Pak Salim tadi.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Pak Fakhry, untuk pengerukan tahun ini anggarannya sangat mepet. Jadi kita akan berusaha, saya udah minta kepada Pak Dirjen Tangkap untuk bisa dilakukan di 2023.

Terima kasih.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Kami ini menerima Pak, cuma ada kepastian. Rp15 triliun kalau dikasih Rp30 miliar aja Pak Zaini saya kira tidak mengurangi ...(suara tidak jelas).

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Kalau berhasil Rp15 triliun, *Insyah Allah* selesai. Mohon doa kalau itu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan. *Nggak* lebih dari 1 menit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Tuasikal dan Ibu Saadiah itu menjadi keputusan bersama dan saya mengingat persis bagaimana proses rapat tentang pembentukan Lumbung Ikan Nasional di Komisi IV dan itu bukan hanya di Maluku dan juga Maluku Utara Pak.

Tolong nanti dipersiapkan waktunya untuk kami dari Provinsi Maluku dan juga Maluku Utara untuk bisa rapat bersama dengan Bapak penjelasan secara detail, sehingga kami juga akan menyampaikan ke masyarakat

bagaimana sih sebenarnya tentang Lumbung Ikan Nasional seperti kemarin Pak Menteri ke sana juga sudah disinggung tentang Lumbung Ikan Nasional.

Saya mohon dengan sangat menjadi atensi dan perhatiannya karena ini termasuk isu yang sangat besar bagi kami di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Tapi kita tidak pernah juga pernah membuang Provinsi Papua dan Papua Barat karena ada 4 Provinsi ini juga sangat dekat dengan perbatasan Sulawesi, Sulawesi Utara, dan juga berbatasan dengan Filipina. Tolong Pak Menteri nanti menjadi atensi luangkan waktu biar kami akan menjadi satu pemahaman dan pendapat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup Mbak Alien.

Jadi begini Pak Menteri, saya menyimpulkan ya kalau tidak ada Pandemi Covid-19 kemungkinan anggarannya masih bisa dicicil untuk apa yang disampaikan oleh Presiden, janjinya Presiden. Tapi karena 2020, 2021 anggarannya kan dipotong cukup besar ya kan. Seharusnya ini seharusnya nih Kementerian Pendidikan anggarannya kan 20% harusnya kan dipotong, tetapi tidak bisa karena undang-undangnya mengatakan Kementerian Pendidikan itu harus 20% walaupun selama 2 tahun ini kemungkinan itu masih banyak tersisa karena tidak ada sekolah yang buka selama 2 tahun. Tapi karena undang-undangnya mengatakan harus 20% ya tidak bisa ya. Tolong ini Zaini apa Dirjen Tangkap keluhan-keluhan ini tolong diperhatikan semua.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya, Bang Andi 1 menit.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Saya sebentar aja Pak Ketua.

Ini saya kira Bu Saadiah dan Pak Abdullah mengingatkan kepada Pak Menteri, kebetulan Menterinya kan baru juga nih mengingatkan kepada Presiden dan Menko Pak ya saya tadi kan catatannya di situ yang sudah berjanji sebenarnya ini. Jadi ini karena *live* mudah-mudahan Pak Menteri mengingatkan lagi Menko dan Presiden bahwa ada janji di Maluku Pak. Dan kita menitipkan bahwa betul-betul pesan ini sampai kepada Presiden dan Menteri Pak.

Terima kasih.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Pak Ketua. Terakhir.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

1 menit.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Iya.

Jadi begini Pak Ketua, saya kira kan saya udah bilang Pak Ketua, duit ada apa tidak ada kita nggak ini kapan mau dibangun. Tapi Peraturan Presiden sebagai regulasi menjamin untuk kepentingan Lumbung Ikan Nasional itu harus ada. Saya waktu dengan Pak Luhut, wah itu harus ada Peraturan Presidennya itu kan gitu, supaya pembangunan itu benar-benar jalan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke gini Pak Tuasikal singkatnya gini. Nanti Menteri mengundang Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat diskusi masalah Indonesia Timur. Setelah itu komplainnya Anggota DPR ini, Menteri wajib menyampaikan ke Menko dan ke Presiden. Nanti tolong dijawab lagi jawabannya secara resmi di depan ini semua supaya tahu ya, cukup ya Pak?

Sekarang PT Garam ada komplain apa, tunggu dulu. Pak dari PT Garam ada masalah apa? Kasihan kalau kita undang *nggak ngomong*.

DIRUT PT GARAM:

Baik. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi IV dan seluruh Anggota Komisi IV, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, dan jajaran.

Dari PT Garam kami sampaikan Pak bahwa terkait harga garam di Madura dan di seluruh Indonesia saya kira sudah cukup nyaman Pak petani dengan harga seperti hari ini. Jadi, 2 tahun terakhir ini kita mengupayakan adanya Tata Niaga yang berkeadilan di mana rantai-rantai yang tidak efisien sudah kita potong. Namun memang dengan harga yang ada saat ini ternyata persediaan itu cukup banyak Pak, persediaan para *processor*, kemudian para pengolah garam cukup banyak sehingga harga yang bagus tidak bisa dinikmati karena mereka punya stok banyak Pak.

Oleh karena itu kami mohon apabila memang dimungkinkan, pertama SNI garam itu untuk garam konsumsi diubah atau direvisi tidak minimal 94%, namun maksimal. Karena yang namanya garam sehat seperti saya

sampaikan itu adalah NaCl maksimal 60% itu adalah garam sehat Pak, sehingga kalau NaCl garam konsumsi minimal 94% artinya kan kurang sehat jadinya, makin tinggi makin baik. Jadi garam impor itu kalau dipakai garam konsumsi masih masuk Pak karena minimalnya 94, garam impor 97. Namun apabila dibuat SNI maksimal 90%, maka garam impor otomatis tidak akan pernah bisa masuk ke garam konsumsi. Dan hanya garam rakyat yang bisa dipakai untuk konsumsi karena kebutuhannya itu 5 gram per kapita per hari, kalau rakyat Indonesia 270 juta, 500.000 ton untuk garam konsumsi dan kita itu sudah berdaulat Pak di sektor konsumsi. Apabila garam impor akan diturunkan NaCl-nya menjadi di bawah 94% atau di bawah 90%, mahal Pak, garam sehat itu harganya sekarang untuk setengah kilo itu diatas Rp40.000.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau yang dari Lampung yang kita tengok dulu?

DIRUT PT GARAM:

Yang dari Lampung apabila diproses untuk garam konsumsi saya kira sangat bagus Pak. Garam lokal itu apabila untuk garam konsumsi memenuhi syarat garam sehat saya kira Pak, karena tidak perlu petani itu harus 97%, karena 97% itu untuk memenuhi kebutuhan industri memang dan itu tidak sehat. Seperti air mineral kan kita bukan H₂O murni kebutuhannya, butuh mineral gitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke. Pak Dirut saya paham.

PT GARAM:

Iya, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya belum bisa mengambil kesimpulan masalah ini karena saya harus tanya kepada pakarnya dulu. Nanti kalau saya masukkan kesimpulan rapat panjang ceritanya dan saya diprotes oleh para pakar yang lebih pintar ya.

DIRUT PT GARAM:

Baik, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau yang Lampung itu rasanya sangat berat, karena apa? Ongkos angkutnya mahal dari pulau ke darat. Sementara Dermaga apungnya pernah di dijanjikan sama Plt Dirjen yang lalu akan diberi, tapi anggaranya belum turun.

Pak Dirut Perindo silakan.

DIRUT PT PERIKANAN INDONESIA (SIGIT MUHARTONO):

Baik, terima kasih Pak.

Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Rapat,
Ibu dan Bapak-Bapak sekalian di Komisi IV,
Pak Menteri dan jajarannya KKP.

Baik Pak, sedikit saja Pak dari Perindo Pak.

Kami tentu saja amat sangat mendukung dan program Pemerintah semuanya Pak untuk penyediaan sesuai agenda kita *meeting* pagi ini penyediaan apa namanya stok ikan di seluruh Indonesia. Kami juga melakukannya Pak dengan 15 seluruh 15 cabang kantor cabang kami seluruh Indonesia. Kami *Insy Allah* sudah punya beberapa apa kami yang melakukannya setiap saat Pak dengan *stocking-stockung* ikan yang ada karena bagi kami *stocking* juga merupakan salah satu strategi untuk apa namanya memanfaatkan *cyclical* apa namanya *cyclical business* daripada *cyclical* daripada Perikanan Pak yang ada kalanya ada musim panennya dan ada musim apa namanya *off season* dan *on season*-nya. Jadi *stocking* merupakan salah satu cara kami untuk mempertahankan bagaimana ketersediaan daripada ikan itu baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor-ekspor kita Pak, karena hampir hampir kita juga akan memaksimalkan potensi ekspor kita karena *self efficacy*-nya untuk perikanan di Indonesia sudah melebihi dari 100% artinya sudah bisa dipenuhi dari kebutuhan apa namanya *supply* dari dalam negeri.

Yang kedua Pak, mungkin kami sampaikan juga rencana kami Pak untuk mendukung juga program penangkapan ikan terukur. Kami Pak di PT Perikanan Indonesia sudah merencanakan dan sudah berproses Pak berkeinginan untuk ikut serta di dalam berpartisipasi mendukung program penangkapan ikan terukur ini Pak. Jadi kami akan akan apa namanya sudah berproses untuk segera melakukannya dengan termasuk juga menggandeng atau berbicara dengan *strategic-strategic partner* Pak yang akan bisa mendukung program penangkapan ikan terukur ini.

Demikian Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih atas penjelasannya.

Saya sampaikan di sini, saya akan sidak ke Muara Baru. Dirjen PSDKP, Dirjen Tangkap, nanti saya kasih tahu waktunya karena di sana ada beberapa masalah, saya tidak bisa buka di sini ya. Masih ada sesuatu yang nanti saya sampaikan ke Menteri aja.

Pak Khalid mau *ngomong*? 2 menit, 3 menit?

F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

1 menit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oh ya udah.

F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

To the point saja.

Pimpinan dan Pak Menteri, serta teman-teman sekalian.

Saya merasa miris juga apa yang disampaikan Bu Saadiah walaupun memang bukan Pak Menteri ini yang berjanji, tapi itu menjadi perhatian. Cuma yang ingin saya sampaikan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bu Saadiah senior anda gitu ya.

F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Cuma yang perlu saya sampaikan ini malah yang berjanji Pak Dirjen Tangkap sendiri ini masalah Lampulo, kalau saya hitung hari ini 402 hari Pak janji kita untuk Lampulo tidak terlaksana. Jadi Pak gini Pak, masyarakat berharap, iya, tapi harapan yang kita berikan tidak kita laksanakan ini bahaya karena setiap perjanjian 'Bara Api', maka harus ditepati maka biasakan. Saya berharap khususnya di Kementerian KKP kita bukan Menteri yang suka berjanji tapi Menteri atau Kementerian yang kita menepati janji.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan. Menambahkan 1 menit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya, setelah ini kita ambil kesimpulan ya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Supaya 13.30 selesai.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke. Begini ya, masalah KKP ya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Begini atau begitu?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Begitu juga boleh terserah lah yang mana, begini sama begitu sama aja.

Berdasarkan Tatib DPR Pasal 7 ayat (g) ya, kami di sini menindaklanjuti aspirasi masyarakat ya. Pasal 11 ya ayat (j) ini supaya teman-teman paham juga, kami ini di sini mengusulkan dan memperjuangkan daerah karena dalam sumpahnya itu sama Pak, "Demi Allah", kalau masih punya Tuhan dan masih takut sama Tuhan ya itu aja. Nah jadi tolong kayak berapa kali Dirjen Tangkap kan *under supervision direct from Mister Minister of Fisheries* kan begitu, tolong lah ya yang masalah ketinting kek, masalah kapal ini udah capek banget. Saya mohon maaf, kecil masalah ketinting Pimpinan ya boro-boro yang kecil aja *nggak* bisa diakomodir apalagi yang gede.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke, cukup?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Nah itu aja. Jadi tolong lah mitra kita bekerja sama dengan baik, toh ini juga bukan buat siapa-siapa tapi buat masyarakat Indonesia semuanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Dari dialog, diskusi, saran, dan masukan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebelum kami akhiri rapat hari ini akan kami sampaikan rancangan kesimpulan Rapat Kerja.

Yang pertama,

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penambahan anggaran program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 menjadi sebesar Rp15 Triliun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Anggota?
Pemerintah? Ya pasti setuju lah.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengantisipasi dan menyiapkan berbagai langkah adaptif dalam bentuk program dan kegiatan prioritas dan ... *kok dannya dua kali*, serta reguler tahun 2023 secara efisien, berkualitas, terukur, tepat sasaran, akuntabel, dan transparan dalam rangka menyongsong pemulihan Covid-19 menuju masa endemi dan perbaikan sistem tata kelola usaha Kelautan dan Perikanan.

Anggota?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

“Pemulihan ekonomi *pasca* Covid-19”, itu aja. Karena ini kan teknisnya masyarakat langsung Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Anggota?
Pemerintah?

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi kepada pembudidaya daya ikan tradisional mengingat tahun 2022 merupakan masa transisi peralihan kewenangan dari Kementerian Pertanian kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Anggota?

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Bapak kalau bilang masalah pupuk Rp425 miliar langsung setuju, tadi belum saya tanya.

4. Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan PT Perikanan Indonesia untuk mengantisipasi menangani adanya peningkatan kebutuhan pasokan ikan menjelang Hari Raya Idul Fitri di setiap daerah dengan harga terjangkau, mengingat ikan merupakan salah satu sumber pangan utama masyarakat yang bergizi.

Anggota?
Pemerintah?

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

5. Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota BBM bagi nelayan, mengingat di beberapa daerah menjadi kelangkaan solar.

Anggota?
Pemerintah?

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jangan setuju setuju tapi langsung ditindaklanjuti ini, kasihan.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

6. Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih memperhatikan kelestarian Wilayah Pengelolaan Perikanan Darat (WPP PD) yang terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa, ...

Sebetulnya bukan “genangan air”, embung itu harusnya.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Genangan air lainnya, benar, GAL.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan. Izin di poin 5 itu. Pimpinan. Ketua. Ketua.

Di poin 5 itu memang BBM itu penting, tapi jangan sebut itu solar karena untuk nelayan kecil *nggak* pakai solar juga pakainya bensin.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Solar dan. Solar, bensin gitu aja udah. Masa yang 6 itu genangan air sih? Gimana ini kalian, genangan air?

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Iya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bukan embung?

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Nggak nggak, Genangan Air Lainnya. Di dalam UU CK Genangan Air Lainnya (GAL).

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya takutnya di depan pintu rumah saya ada genangan air, pelihara ikan lagi.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Itu maksudnya mungkin bendungan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya ulang nomor 6.

6. Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih memperhatikan kelestarian Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Darat (WPP PD) yang terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya untuk kegiatan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, konservasi penelitian dan pengembangan perikanan.

Anggota?
Pemerintah?

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

7. Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki kualitas berbagai bantuan Pemerintah kepada masyarakat, seperti ukuran ikan, benih ikan, mesin pakan, bioflok, alat tangkap, alat pengelolaan dan pemasaran, perbaikan perbengkelan melalui Bakti Nelayan, serta bantuan lainnya di setiap daerah.

Anggota?
Pemerintah?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua. Masukan aja Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Di situ tidak, mohon dicantumkan alat pengolahan pakan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Itu kan ada mesin pakan Pak. Beda ya? *nggak*, tergantung yang *ngomong*. Tenang Pak Hermanto, tadi aspirasi Pak Hermanto langsung saya masukkan, tinggal nanti bagaimana pengajuannya.

Anggota?
Hei, kok kamu naikin yang 7, hei..

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Untuk terkait pakan ini tolong dipertimbangkan untuk pakan alami ya, mungkin ada budidaya pakan alami juga penting untuk dipertimbangkan Pak kalau anggarannya *nggak* naik-naik kayak begini.

Terima kasih.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Perbengkelan mungkin Pak bukan perbekalan. Kalau perbekalan kan kita *nggak*.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke. Pemerintah?

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

8. Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah c.q Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dalam rangka pemerataan peningkatan pelaksanaan pembangunan kelautan perikanan di Indonesia bagian timur dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian alam.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Ketua. Boleh Ketua?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Tadi yang kita seru itu tadi adalah bentuk konkretnya itu adalah Lumbung Ikan Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Anggota?

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Ketua.

Saya kira untuk Lumbung Ikan Nasional harus jadi perhatian ya dalam kesimpulan juga harus muncul biar setiap saat kita tanya, kalau tadi kesimpulan kita kan kita mau ketemu dengan Menteri. Harusnya Pak Menteri kalau bisa agar jelas mungkin Pak Menko sekalian karena ini masih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini kan ini udah ada ini, ada Kemenkonya. Meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah c.q Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dalam rangka pemerataan peningkatan pelaksanaan pembangunan kelautan perikanan di Indonesia bagian timur dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian alam.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Iya, tapi ini kan ini kan Pak Menteri dengan Pak Menko. Yang kita mau langsung dengan masyarakatnya gimana, artinya dengan Pak Menterinya. Makanya kan tadinya kan Pak Menteri mau bersama dengan Maluku Utara dan Maluku, harapan kita kalau bisa juga dengan Pak Menko supaya jangan kita di Menko-nya lain, Pak Menteri Perikanan juga lain karena kita kan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya, gini aja Pak Tuasikal. Nanti Pak Menko kan sibuk juga mungkin nanti Pak Menteri bisa memfasilitasi bertemu sama-sama ya.

Oke? Pemerintah?

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup. Udah.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sebelum kami menutup Rapat Kerja, kami persilakan Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini. Saya ingatkan apa tadi yang kita bahas mengenai Maluku, Maluku Utara untuk segera dijadwalkan. Kalau bisa sebelum lebaran, supaya nanti Bapak-bapak ini sebelum reses pulang ke kampungnya tidak ditanyakan lagi.

Silakan.

MENTERI KKP RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang hadir khususnya kepada Pak Abdullah dan Ibu Saadiyah yang sudah *nggak* ada, tapi nanti wakili, iya.

Saya kira itu akan menjadi konsen tadi. Saya kira nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan mudah-mudahan minggu depan ini, artinya kan tinggal minggu depan untuk segera kita bertemu khusus untuk membahas soal ini.

Terima kasih atas masukan secara menyeluruh dan kesimpulan yang sudah dibuat dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih belum dapat kami penuhi sebagai satu harapan yang disampaikan oleh seluruh Anggota dan saya berharap mudah-mudahan ke depan akan segera kita bisa penuhi.

Demikian. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan, atau emosi. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil alamin* Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**(KETOK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002